

ANALISA

1978 - 5

KEBUDAYAAN dan PENDIDIKAN



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIS AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staff CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO,
Harry TJAN SILALAH dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, Rufinus LAHUR

Harga per eks: Rp. 700,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor): Rp. 8.000,— (bayar di muka)

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telpon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telpon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI

337

Daoed JOESOEF,

ERA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KAIT-
ANNYA DENGAN PENDIDIKAN

339

Daoed JOESOEF,

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PEMBENTUK—
AN MANUSIA

368

Kirdi DIPOYUDO,

PELEMBAGAAN POLA HIDUP SEDERHANA

380

Onny S. PRIJONO,

SUATU DILEMMA UNTUK IBU—IBU YANG
BEKERJA

391

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

407

PENGANTAR REDAKSI

Memperbincangkan kebudayaan dan pendidikan, apalagi dengan maksud untuk mengembangkannya, adalah langkah awal demi berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang fundamental itu secara lebih bertanggung jawab. Langkah semacam itu tidak boleh merupakan langkah pertama dan terakhir, tetapi harus menjadi kegiatan yang berlanjut pada masa yang akan datang. Di dalamnya juga terkandung keinginan agar tema yang demikian pokok itu menjadi fokus perhatian yang merata dalam masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Hal ini juga berarti bahwa terlalu berbahaya kalau kegiatan yang begitu fundamental itu dibiarkan untuk dipikirkan oleh hanya satu badan, katakan Departemen P dan K. Sebaliknya diharapkan agar seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun pihak swasta, termasuk sekolah, masyarakat dan terutama orang tua, ikut bertanggung jawab. Pada tahap pertama diperlukan usaha untuk semakin mendalami masalahnya secara bersama, meneliti kesempatan-kesempatan atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan dan menata kemampuan kita secara menyeluruh untuk melaksanakannya. Untuk itu maka pelbagai pemikiran perlu saling dikomunikasikan secara terus menerus agar dapat semakin merata dan menjangkau kalangan yang lebih luas. Pemerataan dan persamaan informasi semacam ini pada gilirannya dapat menciptakan persepsi yang sama mengenai masalah yang sedang dihadapi, yang selanjutnya dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang terarah secara nasional. Dengan demikian beban pengembangan kebudayaan dan pendidikan dapat dipikul secara merata oleh seluruh masyarakat. Sehingga lambat laun masyarakat Indonesia secara menyeluruh benar-benar menjadi subyek yang bertanggung jawab dalam pengembangan kebudayaan dan pendidikan nasional, termasuk sasaran dan arahnya. Dengan pola semacam ini akan mendalam keya-

kinan kita untuk menghadapi tantangan zaman, sekarang dan terutama pada masa yang akan datang, dengan optimisme. Dalam rangka mengkomunikasikan pemikiran mengenai kebudayaan dan pendidikan itu, maka kali ini ANALISA menurunkan dua tulisan Daoed JOESOEF yang kini menduduki jabatan Menteri P dan K dalam Kabinet Pembangunan III. Yang pertama berjudul "Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan" dan yang kedua "Pendidikan, Kebudayaan dan Pembentukan Manusia"

Salah satu masalah yang erat hubungannya dengan kebudayaan ialah pola hidup mewah di kalangan "the haves", terutama para pejabat/pegawai negeri. Pola hidup mewah semacam itu merupakan suatu masalah karena umumnya di luar kemampuan gaji dan fasilitas pejabat-pejabat, sehingga kalau tidak dibendung besarlah godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Hidup mewah itu juga di luar kemampuan ekonomi nasional dan menghambat pembangunan, yang sebagai akibat sangat terbatasnya dana dalam negeri memerlukan bantuan dana luar negeri. Selain itu gaya hidup mewah suatu kelompok kecil di tengah-tengah rakyat banyak yang terpaksa hidup dalam keadaan serba kekurangan meningkatkan ketimpangan sosial, lagi pula mengingat kedudukan khas pejabat dalam masyarakat sama sekali tidak mendidik bawahan dan masyarakat luas yang membutuhkan teladan baik dari atasannya, terutama dalam hidup hemat dan dalam menggunakan kekayaan secara produktif. Kirdi DIPOYUDO berusaha mengulas masalah itu khususnya demi pembinaan hidup sederhana dalam karangannya "Pelembagaan Pola Hidup Sederhana".

Perkembangan keadaan telah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada kaum wanita untuk berperanan dalam masyarakat. Salah satu seginya ialah semakin banyaknya ibu yang bekerja dengan pelbagai sentuhan pengaruh yang menyertainya; baik yang berhubungan dengan pengembangan karier maupun dengan pelaksanaan tugasnya sebagai ibu, sebagai isteri dan sebagai warga masyarakat. Satu sama lain tentu ada saling pengaruh yang dalam dirinya merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian dan pengertian dari semua pihak. Dalam hubungan ini Onny S. PRIJONO menampilkan karangan "Suatu Dilemma untuk Ibu-ibu yang Bekerja".

ERA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN *

Daoed JOESOEUF

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang integral dari kebudayaan, sama halnya dengan tulisan merupakan bagian yang integral dari teknologi. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah cara yang dipakai untuk meneruskan nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya sedangkan kebudayaan merupakan sekaligus semangat yang menjiwai pendidikan dan kerangka di mana diletakkan setiap pemikiran dan perbuatan di bidang pendidikan.

Berhubung pendidikan pada hakikatnya menyangkut pertumbuhan dan perkembangan manusia maka kebudayaan, yang merupakan jiwa yang menghidupinya dan kerangka dalam ruang mana ia bergerak, juga harus hidup, tumbuh dan berkembang. Maka demi perkembangan manusia ada keharusan untuk mengembangkan kebudayaan seperti halnya ada keharusan untuk mengembangkan ekonomi dan teknologi.

Memang kebudayaan itu sendiri seharusnya merupakan satu proses yang dinamis. Bangsa yang kebudayaannya dibiarkan membeku, yang cukup puas dengan hanya meneruskan kebudayaannya sebagai warisan tanpa sesuatu penyesuaian yang kreatif, akan jatuh tersungkur di depan tantangan-tantangan yang timbul di dalam proses sejarah bahkan hancur tergeletak dilanda roda kemajuan jaman.

* Pidato pada Hari Pendidikan Nasional di Yogyakarta, 2 Mei 1978

Digugah oleh tuntutan perkembangan di bidang sosio politik dan sosio ekonomi sebenarnya kita sudah memasukkan berbagai elemen baru di dalam tubuh kebudayaan kita atau semakin menonjolkan berbagai elemen lama yang sudah terdapat dalam tubuh tersebut. Penonjolan elemen lama dan pemasukan elemen baru ini berarti adanya kehendak supaya kebudayaan kita berkembang. Kehendak ini hendaknya disadari dengan segala konsekwensinya berupa perhatian, prioritas dan fasilitas. Bila perkembangan kebudayaan dibiarkan tanpa perhatian dan tanpa jalur konseptuil yang jelas dan eksplisit dikuatiri kebudayaan akan lebih banyak merupakan faktor penghambat daripada faktor penyubur perkembangan manusia dan bangsa kita.

Kalau kita berbicara tentang perkembangan kebudayaan telah sepantasnya dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan, perkembangan kebudayaan dan ke arah mana perkembangan itu bergerak. Namun walaupun ada salah satu pekerjaan analistis yang tersulit adalah usaha mendefinisikan "kebudayaan" itu sendiri. Walaupun begitu demi kejelasan konseptuil dan keharusan intelektuil, kami berusaha menyajikan analisa yang diperlukan itu. Penyajian analisa kebudayaan ini kami bagi dalam empat bagian pokok, yaitu :

- I. Perkembangan Sosio-Kebudayaan
- II. Kebudayaan
- III. Perkembangan Kebudayaan
- IV. Peranan Pemerintah

I. PERKEMBANGAN SOSIO — KEBUDAYAAN

Apabila kita tidak hanya sekedar mempunyai niat untuk membangun tetapi juga bertekad untuk melaksanakan pembangunan itu, kita diminta untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh pelaksanaan tersebut. Di dalam memenuhi apa yang diperlukan tersebut sebenarnya kita sudah memulai satu usaha lain yang juga cukup luas dan kompleks sifatnya, yaitu mengolah kebudayaan kita ke arah peradaban. Di pihak lain pembangunan itu sendiri, terutama pembangunan di bidang ekonomi, telah menimbulkan berbagai akibat sampingan yang sebagian dari pemecahannya harus datang dari pihak kebudayaan. Maka di hari-hari yang akan datang, ada baiknya disadari,

kita semua akan menghadapi dua kejadian penting di bidang sosial-kebudayaan, yang cukup berat konsekwensinya, yaitu transformasi kebudayaan di satu pihak dan akibat sampingan pembangunan ekonomi di lain pihak.

1. Transformasi Kebudayaan

Melalui usaha pengadaan dan pengembangan hal-hal tertentu yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan berarti kita memasukkan elemen baru atau semakin menonjolkan elemen tertentu yang sudah ada, ke dalam kebudayaan tradisional kita. Dengan membenarkan kehadiran, bahkan perkembangan elemen-elemen tertentu itu secara simultan di dalam sistem nilai yang selama ini kita kenal dan hayati, pada hakikatnya kita, per definisi, telah mengubah kebudayaan kita menjadi satu peradaban (*civilization*), dengan segala macam masalah yang secara potensiil dapat ditimbulkannya baik dalam dimensi waktu maupun dimensi ruang.

Adapun elemen-elemen tertentu tersebut adalah, (i) penggunaan tulisan yang semakin intensif dan meluas di segala bidang kehidupan begitu rupa sehingga tradisi tulisan semakin kukuh berakar di masyarakat, (ii) perkembangan spesialisasi yang semakin mendalam di bidang profesi, (iii) terdapatnya jaringan organisasi politik, administrasi, management dan pemerintahan¹ dan, (iv) kehadiran dan perkembangan kota-kota sebagai tempat pemukiman.

Penggunaan tulisan memang bukan hal yang sama sekali asing di masyarakat kita. Beberapa daerah bahkan mempunyai huruf dan sistem penulisannya sendiri yang khas. Namun penggunaan tulisan yang masih relatif terbatas pada bidang kesusasteraan, perjanjian antar kerajaan dan silsilah keluarga yang juga

1 Dengan "kiat di bidang administrasi, management dan pemerintahan" dimaksudkan sebagai pengalihan bahasa dari "administrative, managerial and governmental arts". Jadi perkataan "kiat" di sini adalah terjemahan dari perkataan "art". Pada umumnya ada kecenderungan untuk menterjemahkan "art" dengan seni". Menurut hemat kami perkataan "seni" lebih banyak berkaitan dengan "keindahan dan perasaan", sedangkan perkataan "art" dalam konteks tersebut di atas lebih banyak berhubungan dengan "ketepatan dan penalaran (reason)". Maka itu kami anggap lebih tepat bila ia diterjemahkan dengan "kiat", satu kata yang diambil dari perbendaharaan perkataan Melayu-Riau.

terbatas di kalangan kaum bangsawan, kiranya tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kerukunan hidup (community) tradisional kita telah bertradisi tulisan. Pengenalan huruf Latin memang telah semakin dimasyarakatkan semenjak kemerdekaan Tanah Air, berkat perluasan pendidikan nasional dan peningkatan pemberantasan buta huruf tetapi penggunaan tulisan belumlah seintensif dan seefektif seperti yang dituntut oleh proses pembangunan dan perkembangan satu masyarakat modern. Perkembangan ini meminta setiap peristiwa agar dicatat, informasi dan komunikasi antara kelompok dan lapisan masyarakat dan antara pemerintah dan warga negara maupun penerusan pikiran dan renungan dari satu generasi ke generasi selanjutnya supaya dilakukan sejauh mungkin secara tertulis. Pembangunan jelas memerlukan penyebaran pengetahuan, baik pengetahuan yang disimpulkan dari pengalaman maupun pengetahuan yang timbul dari pemikiran abstrak dan untuk keperluan ini tulisan terbukti merupakan satu cara penyebaran yang sangat tepat. Tidak tersedianya bacaan populer, misalnya, merupakan satu sebab pokok mengapa orang yang telah melek huruf menjadi buta kembali.

Kurangnya buku pelajaran bagi setiap jenjang pendidikan merupakan penghambat penting bagi pembentukan penalaran anak didik. Kelangkaan bacaan ilmiah populer yang harganya relatif murah sangat tidak membantu perkembangan imajinasi intelektual warga masyarakat. Maka itu pemupukan tradisi tulisan secara sistematis perlu dikaitkan dengan, bahkan merupakan bagian yang integral dari, suatu aksi kebudayaan yang berupa kebijakan buku (book's policy).

Pembagian kerja yang menjurus ke arah perkembangan spesialisasi profesional telah dikenal juga di kalangan kerukunan hidup tradisional kita. Namun pada mulanya pembagian kerja ini sekaligus merupakan pengelompokan status di dalam jenjang kemasyarakatan, sedangkan kesyahan (legitimacy) jenjang tersebut didasarkan pada adat atau kepercayaan keagamaan. Dengan begini seseorang dengan sendirinya dianggap termasuk profesi tertentu berhubung dia dilahirkan di kalangan keluarga yang tergolong pada satu kelompok sosial tertentu. Karenanya perubahan profesi hampir tidak mungkin berhubung hal ini

sekaligus berarti perpindahan ke kelompok sosial yang lain yang pada gilirannya berarti perubahan di dalam status sosial. Sesuatu perubahan profesi menjadi lebih sulit bila ia mengakibatkan mobilitas vertikal ke atas di dalam jenjang kemasyarakatan. Yang terakhir disebut ini hanya mungkin melalui proses perkawinan ataupun upacara adat dan hampir tidak ada hubungannya dengan minat, bakat ataupun ketrampilan bekerja seseorang mengenai profesi yang bersangkutan. Pada permulaan abad ke-19 Raffles mencatat tidak kurang dari 30 jenis spesialisasi profesional telah terdapat di Pulau Jawa. Pembagian kerja yang dicerminkannya praktis telah terlepas dari kaitan adat dan kepercayaan keagamaan. Setiap profesi memang mempunyai status sosial yang khas di dalam pandangan masyarakat sekitarnya tetapi persepsi tersebut lebih banyak didasarkan atas pengetahuan, ketrampilan dan latihan yang dituntut oleh profesi yang bersangkutan daripada atas faktor kelahiran ketergolongan pada sesuatu kelompok sosial. Di samping elemen artistik memang elemen mistik masih sangat menguasai setiap jenis profesi namun pada dasarnya setiap profesi terbuka bagi setiap orang. Umumnya setiap spesialisasi profesional yang disebut itu menghasilkan barang yang diperlukan oleh masyarakat di sekitarnya dan sedikit sekali yang bergerak di sektor tersier melalui jasa khusus yang ditawarkannya. Keberhasilan usaha pembangunan sangat tergantung pada tersedianya berbagai macam keahlian profesional yang lain daripada yang selama ini pernah kita kenal. Semakin diperluas usaha pembangunan dan semakin ditingkatkan akselerasinya, semakin diperlukan adanya perkembangan suatu peralatan teknis yang berdimensi luas: insinyur, peneliti ilmiah, spesialis di bidang-bidang perencanaan, pemasaran, pengurusan dan hubungan kemasyarakatan, ahli-ahli hukum, design serta administrasi dan banyak lagi keahlian tersier lainnya yang berperanan sebagai penggerak mesin pembangunan. Betapa tidak. Supaya pertanian dan industri mempunyai efektivitas dan efisiensi yang tinggi, misalnya, diperlukan di sebelah hulunya serangkaian jasa-jasa penting seperti penelitian, programming, studi kasus, sedangkan di bagian hilirnya diperlukan jasa-jasa berupa pengumpulan yang tepat pada waktunya, pergudangan, distribusi, transformasi, pemasaran dan semua ini harus berjalan dalam satu jaringan peraturan (hukum) yang terpadu dan saling menunjang. Perkembangan peralatan teknis dan sektor tersier

ini pada gilirannya memerlukan suatu aksi kebudayaan berupa, antara lain: pusat latihan, sekolah kejuruan, institut administrasi dan pengurusan, kollese politeknik dan universitas serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang memberikan kesempatan pada setiap orang untuk turut berperanan di dalam pembangunan melalui pengetahuan dan keahlian yang diajarkannya.

Setiap spesialisasi profesionil dalam dirinya mewakili satu keahlian yang khas dan khusus. Setiap keahlian menjadi semakin berbeda dengan lainnya dengan semakin dipertajam dan diperinci setiap bidang spesialisasi, melalui pemisahan dan pengkhususan lebih lanjut yang banyak sedikitnya didorong oleh tuntutan dan tujuan pembangunan. Pada gilirannya setiap keahlian melahirkan struktur, mekanisme dan sistem bekerjanya sendiri yang begitu melembaga dan dilembagakan sehingga tubuh masyarakat merupakan satu substansi dinamis yang meliputi suatu kompleks variabel yang saling berkaitan. Supaya dapat bekerja dengan lancar di dalam keadaan yang serba kompleks tersebut biasanya pada waktu yang bersamaan masyarakat sendiri menumbuhkan *suatu organisasi sebagai sistem interaksi yang terkoordinir* daripada orang, lembaga, tata cara, tujuan dan asas kerja. Dalam pengertian ini, organisasi bukanlah satu obyek materiil. Ia dapat dikenal hanya secara tidak langsung melalui peralatan ataupun orang yang terlibat di dalamnya. Ia merupakan satu sistem yang terdiri dari kegiatan-kegiatan manusia, satu sistem di mana keseluruhannya selalu lebih besar dari jumlah bagian-bagian yang termasuk di dalamnya dan di mana setiap bagian berhubungan dengan setiap bagian lainnya secara khas. Sebagai satu sistem ia rekat terjalin oleh persamaan tujuan, oleh kemauan beberapa orang tertentu untuk membantu jalannya organisasi dan ketrampilan orang-orang tersebut untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Organisasi juga bukan hal yang sama sekali baru di dalam kebudayaan kita. Semenjak dahulu kala kerukunan hidup di daerah pedesaan dengan caranya yang khas telah menjalankan organisasi baik di bidang sosial, ekonomi, kesenian dan pemerintahan. Bedanya hanyalah bahwa ia dahulu dilakukan dalam skala kecil dan di antara organisasi sejenis berbagai desa yang praktis tidak mempunyai hubungan satu dengan lainnya berhubungan pertanian, yang menjadi dasar dominan kehidupan penduduk ketika itu, membuat desa menja-

di satu kerukunan hidup (community) yang relatif otarkis di bidang ekonomi dan relatif otonom secara politis terhadap masyarakat luas yang meliputinya. Beda pokok lainnya dengan yang kita kenal sekarang adalah bahwa ia dahulu lebih banyak berbentuk informal daripada formal karena, antara lain, mobilitas vertikal tidak merupakan hak setiap warga yang diakui secara umum, setiap warga mengenal benar kualitas pribadi warga lainnya dan orang belum hidup dalam tradisi tulisan dalam arti yang sebenarnya. Dengan semakin meningkat dan meluasnya spesialisasi dan pembagian kerja yang diakibatkannya, yang banyak sedikitnya merupakan tuntutan pembangunan, semua organisasi — kecuali negara dan sampai tingkat tertentu lembaga keagamaan — dalam dirinya merupakan sistem yang parsial. Ia tergantung pada sistem-sistem yang lebih besar dan lebih lengkap. Organisasi-organisasi yang paling lengkap sekalipun, pada gilirannya, termasuk ke dalam satu sistem yang sifatnya informal, begitu luas sehingga tidak pasti dan kabur, yang biasanya disebut "masyarakat". Maka itu masyarakat sebagai keseluruhan perlu mengembangkan kebudayaan organisasi dan administrasi, di samping kebudayaan politik tentunya, yang dalam dirinya merupakan ramuan yang penting bagi pembentukan suatu masyarakat beradab (considerate society) maupun suatu "elaborate government". Hal ini menjadi lebih penting mengingat kehadiran pekerja otak dewasa ini tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam kotak-kotak hierarkis dari organisasi bentukan model masa lampau. Mereka tidak akan bersedia menerima itu begitu saja, mungkin mereka perlu dimotivir secara lain dari yang selama ini telah dikenal.

Sejarah manusiawi mengatakan kepada kita bahwa *pertumbuhan kota sebagai tempat pemukiman manusia* terjadi di mana-mana. Kota memang merupakan satu daya penarik tersendiri yang sangat mempesona bagi manusia di daerah sekitarnya, sama halnya dengan cahaya lampu bagi laron di malam hari. Semenjak kemerdekaan nasional bangsa kita telah berusaha keras menaikkan tingkat kecerdasan warganya, melalui berbagai jalan dan cara, jauh sebelum usaha pembangunan yang sistematis dimulai. Hal ini terang mempunyai akibat atas pertumbuhan kota. Dewasa ini kita menyaksikan betapa kota-kota tumbuh dan berkembang dengan pesatnya walaupun selama ini hal

itu tidak dikehendaki dan sama sekali tidak termasuk kejadian yang sangat direncanakan dalam rangka pembangunan. Namun kami kira pertumbuhan kota seperti ini akan terjadi terus di hari-hari yang akan datang walaupun andaikata tingkat pertumbuhan penduduk tidak lagi secepat seperti sekarang ini dan tanah pertanian masih dapat ditambah untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali. Kecenderungan tersebut kiranya menjadi jelas bila kita bersedia menelaah lebih jauh dari sekedar aspek materiil pertumbuhan kota. Secara materiil proses urbanisasi memberikan kita gambaran berupa perpindahan penduduk dari desa ke kota, menetap dan berkembang biak di kota. Bila kita menyelidiki mekanisme psikologis proses tersebut, yang terdapat di balik aspek materiilnya, kita akan melihat bahwa *urbanisasi mempunyai hubungan yang khusus dengan perkembangan rasional*. Sejarah mengatakan bahwa pemikiran seperti ini memungkinkan manusia untuk membebaskan dirinya dari tekanan-tekanan dan hambatan-hambatan tertentu dan mendukungnya ke arah kemajuan, ke segala penjuru dan di segala bidang sedangkan kota memberikan kesempatan untuk semua ini. Kota memang memberikan banyak kemungkinan baik bagi perkembangan ekonomi, kebudayaan maupun politik. Akumulasi manusia-manusia di dalam ruang geografik yang disebut "kota" memungkinkan pertukaran barang dan pikiran yang lebih intensif, mempermudah penemuan-penemuan ilmiah, mempermudah perkembangan teknik karena di kota lebih gampang diperoleh alat-alat informasi dan lebih banyak tersedia alat-alat pengetahuan daripada jika orang itu tinggal di tengah dusun ataupun terpencil di puncak gunung. Di samping itu kota-kota semakin lama menjadi pusat-pusat di mana diambil keputusan-keputusan (*centres of decisions*) baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun administratif dan lebih-lebih politik. Kecenderungan ini didorong oleh kemajuan alat-alat komunikasi dan diperkuat oleh gagasan desentralisasi. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa kota-kota, sebagai akibat yang wajar dari pertumbuhannya, sudah semenjak dahulu menjalankan fungsi kebudayaan dan fungsi politik. Melalui dinamika dan lembaga-lembaganya kota terbukti dapat membantu manusia memperbesar kecerdasan dan kesadarannya. Melalui perkembangan kecerdasan dan kesadaran ini, kota membantu memperbesar kebebasan manusia itu sendiri karena hakikat dari

kebebasan adalah kesanggupan untuk menentukan, yaitu kesanggupan memilih sendiri.

2. Akibat Sampingan Pembangunan Ekonomi

Bagi masyarakat yang sedang membangun, perkembangannya ditandai oleh keadaan yang tidak stabil secara permanen. Ketidakstabilan ini berhubungan erat dengan akibat-akibat yang inheren dengan usaha pembangunan itu sendiri, akibat-akibat yang sama sekali tidak dapat dielakkan dan semakin menjadi menonjol dengan semakin dipercepatnya proses pembangunan tersebut. Akibat-akibat sampingan ini kiranya dapat digolongkan ke dalam tiga kategori pokok, yaitu (i) kepenuhsesakan, (ii) perubahan-perubahan dan, (iii) ketidaksamaan (inequalities).

Gejala *kepenuhsesakan* timbul karena ternyata ruangan tidak elastik. Terutama di kota-kota besar di mana proses pembangunan itu berjalan dengan pesatnya, gejala kepenuhsesakan itu dari hari ke hari di masa mendatang menjadi semakin menonjol dan semakin mencekam penghidupan. Kota-kota menjadi penuh sesak karena dengan membangun itu orang mengambil ruangan yang lebih banyak. Usaha mencapai laju pembangunan yang tinggi mengakibatkan suatu transformasi yang pesat di dalam peralatan ekonomi dan di bidang usaha produktif. Hal ini pada gilirannya mendorong terjadinya migrasi secara sektoral dan terutama secara geografis yang begitu rupa sehingga di pusat-pusat pemukiman yang besar terciptalah suatu massa yang terputus dari akar lingkungan sosial-budaya sehingga mengambang walaupun tidak terombang-ambing. Kepenuhsesakan seperti ini tidak hanya (akan) merusak keseimbangan individu, tetapi juga mengubah tata kehidupan sosial. Kota sebagai tempat hidup menjadi terasa semakin sempit, semakin menyemak, public services menjadi semakin menurun — baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas — evolusi lembaga-lembaga, perkembangan prasarana fisik dan struktur mental semakin terasa terlalu lambat, orang seperti digiring ke dalam satu suasana immobil. Immobilisme serta massa yang terputus dari akar tradisionalnya itu, terutama di kota-kota besar, setiap waktu akan dapat berubah menjadi suatu situasi revolusioner, yaitu kenaikan suhu politik yang tinggi, kalau saja ada yang

pandai menawarkan suatu harapan baru yang dikaitkan pada sesuatu ideologi, apapun namanya itu, yang lain dari yang sedang berlaku.

Sejauh yang mengenai *perubahan*, atau lebih tepat mutasi, ia merupakan konsekwensi proses pembangunan juga. Dalam banyak hal ia bahkan dapat dikatakan merupakan pembangunan itu sendiri, dalam arti perubahan yang menuju ke arah pembaruan. Perubahan tersebut lebih banyak merupakan substitusi daripada pengurangan, lebih banyak merupakan transformasi daripada akumulasi. Aktivitas-aktivitas timbul, meningkat, mencapai titik kejenuhan, menurun dan kemudian menghilang dalam ritme "creative destruction" yang dicetuskan oleh proses pembangunan. Bagi siapa yang terpaksa meninggalkan pekerjaan yang lama, mengubah tempat kediaman yang telah dikenal, mengganti tingkah laku dan kebiasaan hidup, demi penyesuaian pada tuntutan perubahan, semua itu dirasakan sebagai satu kepahitan. Tetapi walaupun orang yang bersangkutan tersebut tetap ingin bertahan pada pekerjaan, kediaman dan adat kebiasaan yang lama, keadaan di sekitarnya tidak ikut bertahan tetapi berubah dan lama-kelamaan orang tersebut menjadi orang asing di tengah-tengah suasana pembangunan. Demikian rupa sehingga mutasi psikologis yang dicetuskan oleh pembangunan oleh banyak orang dirasakan lebih banyak sebagai kekacauan daripada sebagai kemantapan.

Proses pembangunan yang menyangkut ribuan proyek dan mempertaruhkan dana jutaan rupiah, dalam dirinya merupakan tantangan dan kesempatan. Perlipatgandaan tantangan dan kesempatan ini pada gilirannya mengundang jawaban dan kesanggupan. Yang paling cakap, yang paling dapat melihat jauh, yang terberani mengambil risiko dengan menerapkan penemuan dan kombinasi produktif baru, akan lebih dahulu dan lebih banyak dapat menangkap manfaat yang ditawarkan oleh proses pembangunan. Yang lamban bergerak, yang kurang cerdas, yang ragu-ragu dan kurang cakap, akan ketinggalan dan semakin tertinggal. Maka timbullah *perbedaan-perbedaan dan ketidaksamaan* terutama di bidang pendapatan. Walaupun ketidaksamaan ini banyak sedikitnya berhubungan erat dengan faktor-faktor natural-obyektif, jadi tidak dengan sendirinya bertentangan

dengan asas keadilan, setiap ketidaksetaraan dan perbedaan secara mudah dapat diisytikan sebagai melanggar asas keadilan.

Akibat-akibat sampingan usaha pembangunan yang semakin hari semakin menonjol ini, terutama di kota-kota besar, kiranya telah mendorong sementara orang untuk mengambil cara pemecahan yang radikal, dalam bentuk menghapuskan sebab yang telah menimbulkan akibat-akibat itu, yaitu menyedop usaha mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang pesat. Terhadap cara pemecahan yang seperti ini ada baiknya ditanyakan: apakah dan di manakah kemiskinan terbukti dapat mengembangkan martabat manusiawi? Membatalkan kemajuan dan perkembangan ekonomi akan hanya berarti kemelaratian yang pada gilirannya akan melahirkan kekacauan, untuk tidak menyebut ketinggalan di berbagai bidang kehidupan di dalam tata pergaulan internasional. Namun di dalam meneruskan usaha pembangunan kita tidak boleh mengabaikan begitu saja suatu keharusan untuk menemukan satu bentuk baru peradaban di mana pembangunan dan kebudayaan dapat sejalan bahkan saling menunjang secara serasi.

Dengan begini berarti bahwa di hari yang akan datang aksi kebudayaan menjalankan satu peranan yang penting, yaitu pengimbang terhadap akibat sampingan dari proses pembangunan. Dengan perkataan lain, diperlukan adanya pengembangan kebudayaan guna memungkinkan manusia Indonesia tidak hanya menjadi lebih kaya secara materiil tetapi juga lebih kaya secara spirituil.

II. KEBUDAYAAN

Kebudayaan ternyata tidak tinggal diam tetapi bergerak, tumbuh dan berkembang. Sebagai akibatnya pengertian kebudayaan juga turut berubah. Analisa berikut ini berusaha meneliti sebab dari perubahan pengertian itu dan kemudian menguraikan apa arti kebudayaan dipandang dari sudut manusia individu dan bagaimana pula artinya bila dilihat dari sudut masyarakat sebagai keseluruhan.

1. Pengertian

Kebudayaan, baik di masa yang lalu maupun dewasa ini, seringkali dikaitkan dengan dua faktor, yaitu: masa lampau dan elite. Kekayaan spirituil berupa pemikiran falsafah, kesusastran dan kesenian, yang tumbuh dan berkembang secara kumulatif di masa lampau secara sadar dan sengaja diajarkan kepada lapisan masyarakat yang memasuki dinding pendidikan formil atau mengikuti latihan yang khas dan khusus. Dari lapisan ini, banyak sedikitnya sesuai dengan yang diharapkan, timbul sekelompok kecil warga masyarakat yang melanjutkan dan mengembangkan terus elemen-elemen kebudayaan itu berkat pengajaran sistematik yang pernah didapatnya dalam rangka pengajaran dan latihan formil tersebut. Tidak jarang kelompok ini untuk selanjutnya berubah menjadi sekumpulan kecil (elite) anggota masyarakat yang mengkhususkan diri dalam aktivitas kebudayaan yang kadangkala berupa ide dan pemikiran baru di bidang nilai-nilai kehidupan manusiawi. Begitu rupa sehingga berkat aktivitas elite ini perbendaharaan nilai yang telah dikembangkan oleh nenek moyang kita semenjak ia berhenti dari makhluk-hampir-hewan menjadi makhluk-manusia tidak hilang punah ditelan perkembangan jaman.

Sayangnya kebudayaan yang cenderung untuk diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan mengenai karya kesenian dan karya akal budi masa lampau itu secara tradisional ditanggapi pula secara konsumtif. Kebudayaan yang ditanggapi secara konsumtif ini memang mempunyai nilai, memang ada gunanya. Namun artinya menjadi hilang apabila ia ditransformir dari alat menjadi tujuan, seperti yang secara praktis dilakukan oleh sistem pendidikan dan latihan kita baik di dalam maupun di luar sekolah. Ketika pengetahuan dan ketrampilan yang lahir dari kebudayaan lampau itu tidak dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang lahir dari perkembangan materiil masyarakat modern, orang menjadi ragu. Di kalangan lapisan masyarakat kita yang terpelajar, mula-mula secara naluri tetapi kemudian secara sadar, tidak lagi menanggapi kebudayaan semata-mata secara konsumtif tetapi lebih banyak sebagai kekuatan pembaruan dan daya kreatif. Untuk keperluan ini mereka mulai melihat ke berbagai elemen kebudayaan Barat, di antaranya ilmu pengetahuan.

Ternyata pikiran ilmiah Barat tidak terlalu membantu kita di dalam memberikan pengertian tentang kebudayaan. Di tahun 1952 Kroeber dan Kluckhohn, misalnya, menemukan tidak kurang dari 166 definisi mengenai kebudayaan selama kurun waktu 1871 — 1952, yang diajukan oleh para anthropolog, sosiolog, psikolog dan lain-lain ahli ilmu sosial, bahkan ahli kimia, biologi dan falsafah. Setiap ilmiawan ini menyatakan batasan pengertiannya sendiri, tekanan arti sendiri dan kadangkala meliputi berbagai isu yang bertentangan satu dengan lainnya.

Para ahli anthropologi yang biasanya gemar mengajukan konsep ilmiah tentang kebudayaan juga mengajukan pengertian yang terlalu polysemik, sesuai dengan penggunaan istilah kebudayaan di dalam analisa permasalahan yang beraneka ragam, misalnya: akulturasi, keanekaragaman kebudayaan, kontak kebudayaan, pola kebudayaan dan lain-lain. Diversitas pengertian kebudayaan dewasa ini telah berkembang demikian rupa sehingga kebudayaan telah kehilangan ketepatan pengertian seperti yang pernah dialaminya di masa lampau sehingga menjadi kabur untuk dipegang. Ini pulalah kiranya yang menjadi sebab utama dari kesulitan di dalam usaha merumuskan sesuatu kebijakan (policy) kebudayaan; sebab bagaimana menerapkan sesuatu kebijakan di satu bidang yang sulit dirumuskan secara "tepat" lebih dahulu?

Tambahan pula di Barat sendiri orang mulai mempersoalkan pengertian kebudayaan mereka. Ketika ilmu pengetahuan yang timbul dari kebudayaan klasik — sistem nilai Yunani-Latin — tidak dapat mengawasi, jangankan menguasai, perkembangan materiil padahal ia yang telah memberikan peralatan dan menunjukkan cara serta jalan untuk memungkinkan perkembangan materiil tersebut, mereka menjadi ragu. Kepercayaan terhadap ilmu yang di Barat selama ini hampir sama teguhnya dengan kepercayaan terhadap agama, menjadi goyah. Melalui kegoyahan kepercayaan terhadap ilmu ini, goyah pulalah kepercayaan kepada pengertian kebudayaan yang telah melahirkan ilmu tersebut.

Jadi bila pengertian kebudayaan kini semakin ramai diperdebatkan sehingga banyak cendekiawan menjadi enggan untuk

berusaha merumuskannya, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dewasa ini tidak ada satupun model kebudayaan yang kiranya dapat dijadikan sebagai satu-satunya bahan referensi. Dewasa ini, tidak ada satupun peradaban yang sudah mati ataupun yang masih hidup, tidak di masa yang lalu maupun di masa sekarang, yang kiranya dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manusia kontemporer yang hidup di satu masa transformasi kebudayaan ke arah peradaban melalui proses pembangunan.

2. Arti Kebudayaan bagi Manusia Individuil

Kebudayaan bukan lagi, tidak semata-mata, pembentukan manusia individuil melalui pengenalan dan penghayatan kesenian maupun kesusastraan serta pengetahuan tentang karya kebudayaan masa lampau. Renungan mengenai berbagai macam bentuk kesenian dan kesusastraan serta pengertian tentang dunia imajinasi spirituil dalam dirinya memang merupakan perbuatan kebudayaan, tetapi apa yang disebut kebudayaan dewasa ini seharusnya lebih luas dari semua itu.

Dipandang dari sudut manusia individuil yang sedang hidup dalam arus perkembangan kebudayaan ke arah peradaban, kebudayaan seharusnya diartikan sekaligus sebagai suatu pengetahuan, suatu pilihan hidup (eksistensi) dan suatu praktek komunikasi.

Kebudayaan merupakan suatu pengetahuan dalam arti perbendaharaan dari hal-hal yang diketahui mengenai masa lampau dan masa kini, mengenai apa-apa yang pernah diciptakan dan yang sedang dalam proses penciptaan. Berkat pengetahuan seperti ini manusia dibantu untuk memahami dengan baik dirinya sendiri, hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, hubungannya dengan alam di lingkungan hidupnya, dan kaitan kegiatannya dengan kegiatan warga masyarakat lainnya. Dari sini jelas betapa eratnya hubungan antara kebudayaan dan pendidikan serta informasi.

Kebudayaan sebagai suatu pilihan hidup berhubung penghayatan kebudayaan membantu manusia untuk menilai, untuk meninjau secara tepat sikapnya terhadap dirinya sendiri serta terhadap dunia di luar dirinya, untuk membuat pilihan dengan kebebasan yang semakin mantap. Sebab kebebasan bukan fungsi dari ada-tidaknya kesempatan untuk memilih (mengenai apa saja), tetapi ditentukan oleh ada-tidaknya kesanggupan (kemampuan) orang itu sendiri untuk menetapkan tujuan, untuk memilih, untuk mengambil keputusan. Dalam artian ini, kebudayaan yang dihayati mendorong manusia untuk membuat prioritas di antara kebutuhan-kebutuhannya maupun di dalam cara-cara memenuhi kebutuhan tersebut dan menetapkan hierarki di antara tuntutan dan kepentingan mengenai organisasi kehidupan individu dan kehidupan kolektif.

Kebudayaan sebagai suatu praktek komunikasi berhubung ada kebutuhan manusia untuk mendapat informasi mengenai perkembangan keadaan yang menjadi semakin kompleks dan berhubung pada waktu yang bersamaan ada pula kebutuhan dari anggota masyarakat untuk membagi pengetahuannya kepada anggota masyarakat lainnya, untuk memberitahukan apa-apa yang dipikirkannya kepada pihak lain. Masyarakat sebagai keseluruhan, demi perkembangannya yang sehat dan teratur, memang diperlukan anggota-anggota yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu berkomunikasi secara korek, teratur (geordned), diajukan secara jelas dan eksplisit serta tercatat (recorded).

Pengertian kebudayaan seperti yang baru diuraikan di atas ini memang merupakan satu tanggapan kebudayaan secara luas. Tetapi hanya kebudayaan dalam arti luas seperti inilah, menurut hemat kami, yang dapat memberikan jawaban pada tantangan yang datang dari proses transformasi kebudayaan, yang datang dari akibat sampingan pembangunan ekonomi, yang dapat memenuhi hasrat untuk mengaitkan secara erat perkembangan kebudayaan dengan pembangunan ekonomi, suatu hasrat yang oleh sebagian besar anggota masyarakat yang kurang terpelajar sudah dirasakan secara naluri (insetingtif).

3. Arti Kebudayaan bagi Masyarakat

Dengan memperhitungkan mutasi konsep kebudayaan dipandang dari sudut individu, maka dipandang dari sudut masyarakat sebagai keseluruhan, kebudayaan kiranya dapat diartikan sebagai segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), kemauan (etika) serta perasaan (estetika) manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Lagi-lagi kami akui bahwa perumusan kebudayaan yang baru diajukan ini merupakan satu pengertian yang luas. Hal ini tidak dapat lain karena kebudayaan yang hidup merupakan pengertian terhadap lingkungan hidup (dunia) di mana kita hidup dan terhadap manusia yang mendiaminya, sejarahnya, wawasan (vision), harapan dan aspirasinya, kegembiraan dan kesedihannya. Kebudayaan harus meliputi pengetahuan tentang gambaran yang sedang terjadi, baik industriil, artistik, politik maupun sosial. Ia harus mencakup perkembangan ilmu pengetahuan serta pengaruhnya atas cara hidup kita dan cara kita berpikir dan bereaksi. Ia harus bersifat interpretatif, bertanya, analitis dan sintetis, begitu rupa sehingga merupakan dasar yang sehat bagi kebijaksanaan.

Kalaupun perumusan kebudayaan secara luas seperti yang kami ajukan ini, baik dari sudut manusia individu maupun dari sudut masyarakat sebagai keseluruhan, sulit disepakati sebagai definisi ilmiah, sesedikitnya ia pantas dipikirkan sebagai satu definisi kerja dari mana mungkin dirumuskan bentuk aksi dan kebijakan kebudayaan yang perlu dilancarkan dewasa ini.

III. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan lebih-lebih bila

ia diharapkan untuk berperanan di dalam pertumbuhan manusia individu dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam. Namun untuk dapat membimbing pengembangan kebudayaan secara tepat dan fungsional kiranya diperlukan kejelasan konsep mengenai arti pengembangan kebudayaan, tujuan pengembangan itu serta fungsi dan bentuk pengembangan tersebut.

1. Arti dan Falsafah Pengembangan Kebudayaan

Rangkaian aksi kebudayaan yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis kami sebut sebagai "pengembangan kebudayaan". Maka yang dimaksudkan dengan pengembangan kebudayaan nasional adalah usaha sadar untuk memelihara, menghidupkan, memperkaya, membina, menyebarluaskan dan memanfaatkan segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran, kemauan serta perasaan manusia Indonesia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk dihayati, diresapi dan dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat.

Adapun falsafah yang menjiwai pengembangan kebudayaan nasional adalah Pancasila seperti yang tercantum di dalam pembukaan dan dijabarkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

2. Tujuan Pengembangan Kebudayaan

Apabila pengembangan kebudayaan dalam pengertian di atas hendak diterapkan dalam situasi dan perkembangan masyarakat kita di hari-hari yang akan datang, maka tujuan dari usaha pengembangan kebudayaan nasional ini dapat dibedakan secara umum dan secara khusus.

Adapun yang menjadi tujuan umumnya adalah terwujudnya perkembangan cipta, rasa dan karsa manusia Indonesia yang terus-menerus, berimbang dan selaras dengan kepribadian Indo-

nesia sehingga merupakan modal intelektual dan spirituil yang berguna dalam mengembangkan hidupnya dalam batas hakikatnya masing-masing serta bagi usaha memperkuat kepribadian, martabat, peradaban, kerukunan, ketahanan dan kesatuan nasional dan perdamaian internasional.

Tujuan umum ini disesuaikan pada keharusan menemukan satu bentuk baru peradaban di mana kebudayaan dan pembangunan ekonomi saling menunjang berhubung kebudayaan berada pada muara pertemuan dua arus besar gagasan yang menandai peradaban dan pemikiran kontemporer, yaitu pengertian pembangunan di satu pihak dan tuntutan martabat manusia di lain pihak. Dengan perkataan lain, tujuan umum ini berhubungan erat dengan pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pengembangan kebudayaan.

Pendidikan demi pembangunan ekonomi berarti keharusan membangun dasar manusiawi (human foundations) daripada pembangunan yang jelas memerlukan waktu yang jauh lebih lama dari membangun superstruktur fisik. Membangkitkan tradisi tulisan, kebiasaan berpikir numeris maupun menyajikan ekspresi yang eksak di antara penduduk dari sesuatu masyarakat tradisional biasanya memerlukan waktu puluhan tahun. Sebaliknya mengadakan konstruksi infrastruktur sosial, seperti sekolah ataupun rumah sakit, dan fasilitas industriil ataupun komersiil dapat diselesaikan dalam waktu tahunan. Inilah sebabnya mengapa negara-negara yang sedang menyelesaikan usaha pendidikan dasar, peningkatan ketrampilan dan pembentukan sikap produktif acapkali terlihat sebagai negara yang mengalami stagnasi karena usaha (input) seperti itu tidak tercermin sebagai keuntungan di dalam pendapatan nasional (GNP). Sedangkan sebenarnya, negara ini sedang membangun modal manusiawi yang dapat menghasilkan manfaat yang nyata di dalam pendapatan nasional di kemudian hari.

Mengakui hubungan antara pendidikan dan pengembangan kebudayaan berarti secara implisit mengakui perlunya suatu pendidikan yang terus-menerus apabila ia hendak dikaitkan

secara fungsional dan efektif bagi pengembangan kebudayaan. Sebab hanya apabila pendidikan dan kebudayaan itu dikaitkan secara erat akan terlihat betapa perlunya pendidikan ditanggapi sebagai satu proses seumur hidup yang terpadu dan bukannya hanya sebagai hasil dari sesuatu persekolahan formal. Hanya dengan cara ini akan terlihat betapa aspek kebudayaan akan tampil pada setiap tahap kehidupan manusia. Namun penerapan pendidikan yang terus-menerus (seumur hidup) pada pengembangan kebudayaan menimbulkan serangkaian masalah teknis yang beraneka ragam dan kompleks seperti pembangunan suatu infrastruktur yang sepadan (pusat-pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan maupun audio-visual, museum, perpustakaan, klub sport ataupun pencinta alam, dan lain-lain) yang menjadi semakin mendesak dengan semakin meningkatnya urbanisasi; pengadaan pendidik khusus dan pamong kebudayaan (cultural animator); penggunaan yang bijaksana dari peralatan modern informasi massa; perumusan ketentuan dan peraturan yang berupa program pendidikan orang dewasa dan acara guna mengisi waktu senggang bagi penduduk pedesaan ataupun orang tua ataupun orang cacat.

Sumbangan museum dan pusat ilmu pengetahuan sangat penting bagi proses modernisasi maupun transformasi kebudayaan ke arah peradaban pada umumnya dan bagi pemupukan suatu kebudayaan ilmiah yang mendasar pada khususnya. Pusat seperti ini dapat berupa Lembaga Matematik di mana publik dapat berkenalan dengan metode analisa modern, turut serta dalam aktivitas laboratorium, menghadiri ceramah dan demonstrasi yang menampilkan penggunaan yang semakin meningkat dari matematika di segala bidang kehidupan. Ia dapat pula berupa Lembaga Penemuan dimana publik diperkenalkan pada proses penelitian dasar yang menghasilkan ilmu pengetahuan baru ataupun benda-benda yang dipergunakan manusia sehari-hari. Ia dapat pula berupa Lembaga Teknologi yang dapat membantu publik untuk memahami suatu cara berpikir dan cara hidup yang berkaitan dengan teknologi yang tidak dapat kita elakkan tetapi yang harus kita pergunakan demi kesejahteraan masyarakat sebagai keseluruhan.

Pamong kebudayaan diperlukan agar publik yang awam dapat menangkap pesan spirituil yang dikandung oleh sesuatu benda kebudayaan. Karya kesenian yang kita rawat dan yang ingin kita wariskan kepada generasi penerus bukan sekedar benda yang harus dikagumi ataupun dianggap keramat. Nilai maupun artinya terletak pada gema yang dipantulkannya pada orang yang memperhatikannya. Karya tersebut harus dapat bertindak sebagai penggugah, sebagai pembugah, sebagai penghibur, sebagai pengingat, sebagai faktor referensi.

Agar supaya terjalin kontak antara sesuatu karya dengan pengamatnya tidak cukup hanya pameran. Cara menanggapi sesuatu lukisan, arca ataupun pementasan sesuatu cerita akan sama banyaknya dengan jumlah orang yang menyaksikan karya-karya tersebut. Banyak di antara tanggapan itu seringkali berupa tanggapan yang dangkal. Maka itu diperlukan adanya suatu perantara, yang dalam hal ini disebut "pamong kebudayaan", yang tugasnya berupa animasi. Animasi, yang sekaligus berarti pengenalan dan pengertian, bukan sekedar berupa suatu penyajian baru dari karya kesenian. Jangkauannya meliputi penampilan bidang kebudayaan sebagai keseluruhan. Animasi bukan sekedar satu pendidikan kebudayaan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Ia berusaha menyalakan api perhatian, memberikan pandangan tetapi tidak mendesakkan sesuatu kehendak. Ia harus dapat memberikan alasan-alasan perasaan apabila pikiran tidak dapat menjelaskannya kepada orang-orang yang berada pada tingkat pengetahuan yang berbeda tetapi sama di dalam emosi terhadap keindahan, sama di dalam mencari kekayaan spirituil, sama di dalam keinginan menikmati kekayaan kebudayaan.

Sejauh mengenai tujuan yang khusus dari usaha pengembangan kebudayaan nasional, ia berhubungan dengan kebutuhan yang mendesak dari masyarakat kita yang sedang berada dalam proses transformasi baik di bidang kebudayaan maupun di bidang ekonomi. Transformasi yang terjadi melalui usaha pembangunan ekonomi ini menunjukkan lima kelemahan pokok yang bila tidak ditanggulangi dapat menjadi bencana jika

dilihat dari sudut kebudayaan. Kelemahan ini berupa ketidak-sanggupan proses transformasi itu untuk menguasai hubungan antara kerja dan kesenggangan (leisure), perkembangan kota, penggunaan peralatan audiovisuil, pemerataan penikmatan hasil pembangunan dan partisipasi.

Usaha pembangunan, yang menuntut orang tidak hanya bekerja lebih keras tetapi juga lebih banyak cenderung untuk mendorong jam kerja riil mengambil bagian yang semakin lama semakin banyak dalam keseluruhan waktu kehidupan sehari-hari sehingga jam kesenggangan menjadi semakin sedikit. Perbandingan yang semakin pincang antara jam kerja dan jam senggang, terutama di kota-kota besar, mungkin karena didesak oleh kebutuhan hidup sehari-hari, lebih-lebih di kalangan kelompok yang berpendapatan rendah dan menengah. Walaupun jam kerja resmi tetap, tetapi banyak waktu habis untuk melaksanakan berbagai macam kerja tambahan demi memperoleh tenaga-beli yang lebih banyak. Bila ada pilihan antara kesenggangan dan tenaga-beli, sebagian besar orang memilih tenaga-beli. Kelihatannya orang lebih suka menaikkan jumlah pembelanjanya daripada menaikkan mutu kebudayaan dari hidupnya. Kerja menjadi alat untuk berbelanja lebih banyak sedangkan kesenggangan alat untuk mengkonsumir lebih banyak.

Di samping itu, dengan meningkatnya usaha pembangunan ekonomi, melalui usaha menaikkan tingkat produksi, produktivitas dan efisiensi, semakin banyak pekerja-tangan, melalui sistem ban berjalan yang rasionil, melakukan pekerjaan yang menjemukan, walaupun tidak mematikan kepribadian manusiawinya. Ritme mesin industriil mendikte gerak-tindak manusia, mengurangi marge inisiatifnya dan mendorongnya menjadi faktor yang pasif. Gejala pasifitas seperti ini mulai kelihatan juga pada pelaksanaan elite yang diberi wewenang tanggung jawab di bidang-bidang administrasi dan ekonomi yang menduduki teknostruktur berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di kalangan ini juga jam kerja semakin lama semakin banyak menyita waktu kehidupan sehari-hari walaupun mungkin lebih banyak karena pertimbangan prestise ataupun dedikasi pada

tugas dan pekerjaan. Namun begitu akibatnya adalah bahwa kreativitas pekerja otak (knowledge workers) ini cenderung semakin menurun.

Waktu tersisa yang tidak banyak biasanya diisi dengan hiburan ringan yang sama sekali tidak membantu perkembangan nilai-nilai budaya di dalam diri orang yang bersangkutan karena acapkali hiburan itu berupa dua jenis pelarian. Pertama secara pasif duduk di muka TV atau mendengarkan radio yang menampilkan tontonan ataupun hiburan musik yang setiap kali kurang bermutu dipandang dari sudut kebudayaan. Atau secara aktif melakukan aktivitas erotik yang hanya memuaskan naluri elementer yang tidak banyak berbeda dengan naluri makhluk hewan.

Berhubung dengan semua ini kebudayaan terpenggil untuk memanusiawikan mekanisme dan lingkungan kerja di satu pihak dan membudayakan kesenggangan di lain pihak. Integrasi kebudayaan ke dalam kerja dan kesenggangan memang memerlukan biaya tetapi ia terang bukan satu aksi yang mewah sebab nilai-nilai kebudayaan inilah yang membedakan manusia dari hewan sedangkan kebudayaan merupakan data yang permanen dari kehidupan manusia dan di setiap tahap aktivitas manusia.

Sesudah kerja dan kesenggangan, sesuatu aksi kebudayaan diperlukan untuk memanusiawikan kehidupan kota, terutama kehidupan di kota-kota besar. Urbanisasi seperti yang telah terjadi dewasa ini tidak hanya menurunkan mutu kebudayaan dari kehidupan penduduk kota tetapi juga mengasingkan manusia dari alam lingkungannya. Pada setiap kesempatan ia melarikan diri dari rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya karena ia lebih mencintai kendaraannya daripada tempat kediamannya. Ia memencilkan diri di dalam massa sebagai cara terbaik untuk mengelakkan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.

Guna mencegah akibat yang merugikan perkembangan manusia ini kota-kota perlu dijadikan forum kebudayaan, forum

pertemuan dan komunikasi seni dan sastra, forum ilham dan penciptaan. Dengan perkataan lain, mengatur perkembangan kota seharusnya merupakan bagian dari sesuatu aksi kebudayaan dan tidak hanya bagian dari aksi teknik atau aksi administratif.

Peralatan audio-visuil kini sudah menyebar di seluruh pelosok Tanah Air. Mulanya orang menaruh harapan yang besar terhadap kemajuan teknik komunikasi ini bagi penyebaran nilai-nilai kebudayaan. Dalam kenyataannya harapan ini tidak selalu terpenuhi. Acara yang disajikan tidak selalu berupa penyebaran nilai-nilai kebudayaan tetapi acapkali berupa tontonan dan hiburan yang secara esensiil berupa konsumsi kebudayaan yang kurang membekas. Aksi kebudayaan dalam hal ini lalu berupa usaha bagaimana dengan penyebaran peralatan audio-visuil ini dapat membuat setiap rumah tangga menjadi satu pusat kesenian di mana seluruh anggota keluarga tanpa pergi dari tempat kediamannya dapat menikmati penyajian musik ataupun tari-tarian yang pada waktu bersamaan diperagakan di tempat lain yang jauh terpisah. Di pihak lain, dengan menyebarnya radio, kaset, bahkan televisi sampai ke pedesaan yang terpencil telah berhasil menyebarkan penggunaan bahasa nasional yang menjurus kepada persatuan, meluaskan cakrawala pandangan dan pengetahuan penduduk yang terpencil serta perataan informasi. Perataan informasi ini penting guna memungkinkan penduduk sampai yang jauh terpencil sekalipun mengambil pilihan-pilihan yang tepat, membangkitkan "sense of priority" di dalam tindakannya sehari-hari.

Pemerataan penikmatan hasil pembangunan sesedikitnya dapat didekati dari dua sudut. Dari sudut pembagian yang lebih merata dari pendapatan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan melalui kebijakan fiskal yang aktif dan progresif. Dari sudut perataan partisipasi di dalam proses produktif yang menghasilkan pendapatan melalui kebijakan pendidikan. Bila pendidikan dikaitkan dengan usaha pembangunan, artinya secara sadar harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan komponen preventif dari unemployment, dalam hal ini analoog dengan

preventive medicine. Hal ini penting dilakukan lebih-lebih bila diperhitungkan teknologi yang dipakai di dalam pembangunan. Teknologi tidak netral terhadap banyak hal, di antaranya terhadap jenis output yang dihasilkan, terhadap kesempatan kerja (employment) dan melalui yang terakhir ini, terhadap pola pembagian pendapatan. Bila demikian ukuran efektivitas dan sukses sesuatu sistem pendidikan juga menjadi lebih jelas, yaitu sampai berapa jauh tenaga kerja yang tersedia dapat memenuhi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang ada dan sampai berapa jauh pekerjaan-pekerjaan yang tersedia dapat diisi oleh tenaga-tenaga kerja berdasarkan persiapan (pendidikan) yang mereka alami sebelumnya, baik secara formil maupun informil.

3. Fungsi dan Bentuk Pelaksanaan Pengembangan Kebudayaan

Fungsi pengembangan kebudayaan nasional adalah :

- a. memelihara kebudayaan nasional ;
- b. menghidupkan kebudayaan nasional ;
- c. memperkaya kebudayaan nasional ;
- d. membina ketahanan kebudayaan nasional ;
- e. menyebarluaskan dan memanfaatkan kebudayaan nasional.

Berdasarkan fungsi tersebut di atas maka pelaksanaan pengembangan kebudayaan nasional pada pokoknya berbentuk seperti berikut :

a. *Memelihara kebudayaan nasional :*

1. Mengelola, menggali dan memperbaiki hasil karya kebudayaan tradisional yang tersebar di seluruh Tanah Air.
2. Meneliti, mendokumentasikan dan memasyarakatkan perbendaharaan kebudayaan nasional.
3. Mengadakan perlindungan cagar budaya.

b. *Menghidupkan kebudayaan nasional :*

1. Membangun sarana, lembaga dan pusat-pusat penelitian, pengkajian, penyajian dan pendidikan kebudayaan.
2. Membangkitkan dan mengembangkan perbendaharaan kebudayaan tradisionil.
3. Menghasilkan tenaga terdidik, melalui jalur pendidikan formil maupun nonformil, yang akan mempunyai profesi di bidang kebudayaan sebagai, antara lain, seniman pelaku, seniman pencipta dan pamong pengembangan kebudayaan nasional.
4. Mendorong pendidikan kebudayaan melalui jalur nonformil yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan kebudayaan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

c. *Memperkaya kebudayaan nasional :*

1. Mengolah bentuk, corak, langgam dan/atau semangat kebudayaan tradisionil untuk diselaraskan dengan tingkat perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan manusiawi di masa depan.
2. Membina bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah.
3. Membangkitkan dan memupuk terus-menerus sumber-sumber penciptaan melalui pengenalan gagasan-gagasan dan karya-karya baru.
4. Mendorong penciptaan kontemporer dari karya kesenian dan karya akal budi.
5. Menyediakan bantuan keuangan dan/atau peralatan oleh Pemerintah bagi usaha non-pemerintah di bidang pengembangan kebudayaan dalam batas kesanggupan keuangan negara dan sesuai dengan prioritas usaha pembangunan nasional.

d. *Membina ketahanan kebudayaan nasional :*

1. Mengamati dan meneliti semua unsur dan kegiatan kebudayaan asing yang dapat merugikan tata nilai kehidupan dan perkembangan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam hal daya penangkapan, pemilihan, penyerapan dan penyesuaian unsur-unsur kebudayaan asing terhadap perkembangan peradaban bangsa sehingga ia merupakan pengolah budaya yang fungsional.
3. Mengatur, mengamati dan mengarahkan penggunaan sarana dan lembaga kebudayaan.
4. Menggiatkan penulisan sejarah nasional serta pendidikan dan pengembangan kesadaran sejarah yang meliputi baik masa lampau, masa kini maupun masa depan.
5. Menggiatkan pengenalan dan perlindungan tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan nasional.

e. *Menyebarkan dan memanfaatkan kebudayaan nasional:*

1. Memperluas kemungkinan dan kemampuan anggota masyarakat untuk turut menghayati, menikmati, membina, memperkaya, memiliki dan menyebarkan hasil karya kebudayaan nasional.
2. Memperluas pandangan hidup, perhatian dan ketrampilan anggota masyarakat bagi kepentingan perkembangan peradaban.
3. Membudayakan hubungan antara kerja dan kesenangan, perkembangan pusat-pusat pemukiman dan penggunaan peralatan audio-visuil serta media komunikasi lainnya.

IV. PERANAN PEMERINTAH

Instansi yang berwenang dalam usaha pengembangan kebudayaan nasional adalah pemerintah. Namun hal ini tidak boleh diartikan bahwa hanya pemerintah yang boleh melakukan segala sesuatu aksi pengembangan kebudayaan. Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau swasta dengan ataupun tanpa bantuan pemerintah karena pada dasarnya pengembangan kebudayaan nasional adalah tanggung jawab perorangan pribadi, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah di satu negara demokrasi seperti Indonesia tidak mempunyai pretensi ataupun hasrat untuk melakukan sendiri sesuatu aksi kebudayaan. Yang menjadi pikiran pemerintah adalah mendorong, membantu non-pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaan. Kalaupun pada suatu ketika pemerintah langsung melakukan sendiri sesuatu kegiatan kebudayaan hal ini demi meletakkan dasar dan menciptakan kondisi supaya berangsur-angsur kegiatan yang bersangkutan dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.

Harus diakui, di suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, di mana sektor non-pemerintah masih relatif lemah di bidang dana dan fasilitas, pemerintah terdorong untuk melakukan sesuatu aksi di bidang apa pun, termasuk bidang kebudayaan. Di samping itu, karena beberapa faktor historis, pemerintah misalnya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perlindungan dan pemeliharaan berbagai benda kebudayaan dan warisan nasional. Pemerintah masih harus membantu setiap usaha kreatif, setiap usaha penyebaran nilai-nilai kebudayaan.

Di dalam jangka panjang setiap bentuk dirigisme kebudayaan harus di jauhi oleh pemerintah dan peranan pemerintah hanya merupakan "pamong kebudayaan", animateur, penggerak dan penggugah perhatian masyarakat mengenai keharusan mengembangkan kebudayaan. Pemerintah melaksanakan sendiri sesuatu aksi kebudayaan hanya di mana pihak non-pemerintah tidak

sanggup melaksanakannya atau di bidang di mana kepentingan dan sekuriti nasional yang menjadi hal yang dipertaruhkan.

PENUTUP

Antara pendidikan, kebudayaan dan pembangunan ekonomi terdapat suatu hubungan timbal-balik. Sebagai akibat hubungan yang seperti ini di hari-hari yang akan datang kita akan menghadapi suatu proses transformasi dari kebudayaan ke arah peradaban dan pemunculan berbagai macam akibat sampingan dari usaha pembangunan yang jawabannya untuk sebagian harus datang dari bidang kebudayaan.

Untuk dapat menghadapi secara tepat kedua kecenderungan yang tidak dapat dielakkan ini kebudayaan perlu dikembangkan berdasarkan satu konsep yang jelas dan eksplisit. Konsep ini kiranya tidak dapat lagi mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan mengenai karya kesenian dan karya akal budi masa lalu. Kebudayaan yang ditanggapi secara "konsumtif" ini memang mempunyai nilai, memang ada gunanya. Namun artinya menjadi hilang apabila ia diubah dari alat menjadi tujuan, seperti yang secara praktis dilakukan oleh sistem pendidikan kita baik di dalam maupun di luar sekolah. Kebudayaan seharusnya ditanggapi sebagai kekuatan pembaruan dan daya kreatif dengan memasukkan berbagai unsur masa depan sebab kebudayaan "kreasi" inilah yang merupakan infrastruktur sedangkan kebudayaan "konsumsi" adalah superstruktur masyarakat.

Arti dan peranan pengembangan kebudayaan menjadi lebih penting bila terhadap setiap akibat sampingan pembangunan ekonomi, yang dalam dirinya sudah cukup menguatirkan di bidang kebudayaan, kita tambahkan dua hal yang terbukti dapat mengganggu stabilitas perkembangan masyarakat. Pertama, kenyataan bahwa kenaikan tingkat hidup, yang merupakan buah yang diharapkan dari pembangunan, telah mencetuskan berbagai macam tuntutan dari pihak berbagai lapisan dan kelompok

penduduk yang mencari akses yang lebih besar terhadap hal-hal yang per definisi termasuk kebudayaan, seperti pendidikan dan informasi. Kedua, kenyataan bahwa jaman kita dewasa ini tidak lagi memiliki ketenangan periode klasik di mana segala sesuatu diakui pada tempatnya, tetapi diliputi oleh kebebasan periode barok di mana setiap sesuatu diganggu-gugat.

Maka itu pengembangan kebudayaan harus dapat menemukan satu bentuk peradaban di mana pembangunan ekonomi dan perkembangan kebudayaan dapat berjalan secara serasi dan saling menunjang, di mana tuntutan martabat manusia dan pengertian pembangunan dapat berpadu secara wajar, banyak sedikitnya melalui jalur pendidikan baik formil maupun informal.

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PEMBENTUKAN MANUSIA *

Daoed JOESOEF

Memikirkan masalah pendidikan merupakan satu kegiatan yang terhormat. Ia dalam dirinya juga merupakan satu usaha yang berguna bagi perkembangan masyarakat. Sebab, bagaimana caranya kita menilai perkembangan sesuatu masyarakat? Apa kriteria yang kiranya dapat dipakai untuk meramalkan bahwa sesuatu Bangsa bakal sehat atau sakit di masa depan? Untuk ini, kami kira kriterianya adalah: keprihatinan (concern) dari satu generasi mengenai pendidikan dari generasi selanjutnya.

Apabila anak-anak dan pemuda-pemuda sesuatu Bangsa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan mereka sesempurna mungkin, apabila kepada mereka diberikan pengetahuan yang cukup untuk memahami dunia serta dibekali dengan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengubahnya, maka gambaran masa depan cukup gemilang. Sebaliknya, sesuatu masyarakat yang mengabaikan pendidikan para pemudanya, sesuatu generasi yang melalaikan pendidikan anak-anaknya, bagaimanapun jayanya penghidupan masyarakat dan generasi tersebut sekarang, masa depannya akan ditandai oleh keruntuhan dan kebobrokan di banyak bidang penghidupan. Sebab, dengan begini berarti bahwa Bangsa ini di masa depan tidak

* Prasaran pada Seminar Pendidikan Musyawarah Perguruan Swasta, Jakarta, akhir Nopember 1977

akan mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk mengadakan perubahan dan pembaruan. Sedangkan Bangsa yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan perubahan dan pembaruan seperti yang dituntut oleh jamannya berarti tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan di dalam dinamika kehidupan. Sebab, yang disebut sebagai pembangunan bukanlah hanya "growth", tetapi "growth" plus perubahan dan pembaruan.

Usaha pendidikan harus dianggap sebagai bagian yang integral dari kebudayaan, sama halnya dengan tulisan merupakan bagian yang integral dari teknologi. Sedangkan kebudayaan harus dijadikan kerangka di mana diletakkan setiap pemikiran mengenai pertumbuhan manusia. Maka itu, walaupun masing-masing hal tersebut merupakan satu substansi yang tersendiri, namun artinya masing-masing menjadi semakin dipahami apabila pembahasan ketiga-tiganya dikaitkan satu dengan lainnya.

KEBUDAYAAN

Salah satu pekerjaan analitis yang sulit adalah usaha mendefinisikan "kebudayaan" berhubung, antara lain, dewasa ini sedang terjadi suatu mutasi kebudayaan. Mutasi ini tercermin dengan jelas dalam keraguan yang secara umum ditujukan kepada pengertian kuno tentang kebudayaan yang ketepatannya dianggap semakin pudar. Mungkin sekali ini pulalah yang menjadi sebab mengapa dirasakan sulit untuk merumuskan sesuatu kebijakan (politik) kebudayaan; dengan perkaatan lain, bagaimana menerapkan sesuatu kebijakan di satu bidang yang tidak didefinisikan secara jelas sebelumnya.

Jika pengertian kebudayaan diragukan begitu rupa sehingga banyak cendekiawan enggan berusaha untuk merumuskannya, hal ini karena dewasa ini tidak ada satu pun model kebudayaan yang kiranya dapat dijadikan bahan referensi. Pernah ada anggapan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan tentang masa lampau, sumber dari semua moralitas, sejarah, ilmu, matemati-

ka, begitu rupa sehingga penghayatan semua ini merupakan prasyarat bagi setiap kemajuan mental (pikiran). Maka itu anggapan ini dijadikan pegangan bagi penyusunan sistem pendidikan dan pengajaran.

Namun ketika kebudayaan yang diartikan seperti itu ternyata tidak dapat mengawasi, jangankan menguasai, perkembangan materiil padahal ia yang telah memberikan peralatan dan menunjukkan cara serta jalan untuk memungkinkan perkembangan materiil tersebut, orang menjadi ragu. Ketika ilmu pengetahuan yang timbul dari kebudayaan lampau itu tidak dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang lahir dari perkembangan materiil itu, kepercayaan orang terhadap ilmu yang selama ini hampir sama teguhnya dengan kepercayaan terhadap agama, menjadi goyah. Melalui kegoyahan kepercayaan terhadap ilmu ini, goyah pulalah kepercayaan kepada pengertian kebudayaan yang telah melahirkan ilmu tersebut.

Maka itu kebudayaan tidak lagi, tidak semata-mata, pembentukan manusia melalui pengetahuan dan penghayatan tentang kesenian, ilmu pasti dan lain-lain nilai masa lampau. Renungan mengenai hal ini semua memang merupakan perbuatan kebudayaan, namun apa yang disebut kebudayaan dewasa ini seharusnya lebih luas dari semua itu.

Berhubung dengan itu, dipandang dari sudut masyarakat sebagai keseluruhan dan dalam rangka pendidikan, dewasa ini seharusnya kebudayaan diartikan sebagai perwujudan keseluruhan hasil pikiran (logika), kemauan (etika) dan perasaan (estetika), manusia, dalam rangka perkembangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan.

ARTI PENDIDIKAN DARI SUDUT MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

Dengan perkataan "pendidikan" di sini dimaksudkan meliputi training dan pengajaran baik formil maupun informil,

pengamatan (observasi) serta (penerusan) pengalaman. Pendidikan yang diartikan seperti ini kiranya dapat menjelaskan mengapa di banyak negeri timbul pendidikan formil gratis bersamaan dengan pertumbuhan produksi industriil; bahwa cara produksi pertanian menuntut persiapan ketrampilan produktif untuk sebagian terbesar dilakukan di dalam rumah tangga pertanian itu sendiri; bahwa perkembangan teknologi yang semakin didasarkan pada ilmu pengetahuan dan penelitian semakin menuntut training formil yang semakin meluas dan mendalam.

Kebudayaan, apakah ditanggapi dalam arti sempit ataupun luas, berkaitan erat dengan dua faktor: masa lalu dan elite. Kekayaan pemikiran dan kesenian yang tumbuh dan berkembang secara kumulatif di masa lampau secara sadar dan sengaja diajarkan kepada lapisan masyarakat yang memasuki dinding pendidikan formil. Dari lapisan ini, banyak sedikitnya sesuai dengan yang diharapkan, timbul sekelompok kecil warga masyarakat yang melanjutkan terus pemikiran dan pengembangan kebudayaan berkat pengajaran sistematik yang pernah didapatnya dalam rangka training formil tersebut. Tidak jarang kelompok ini untuk selanjutnya berubah menjadi sekumpulan kecil (elite) anggota masyarakat yang mengkhususkan diri dalam aktivitas kebudayaan yang melahirkan ide dan pemikiran baru di bidang nilai-nilai kehidupan manusiawi. Begitu rupa sehingga berkat aktivitas elite ini khazanah nilai yang telah dikembangkan oleh orang semenjak ia berhenti dari makhluk-hewan menjadi makhluk manusia tidak hilang punah ditelan perkembangan jaman. Kiranya tidak terlalu aneh bila Edouard Herriot mengatakan bahwa yang dimaksudkan kebudayaan itu adalah "apa-apa yang tetap pada saat yang lainnya telah dilupakan orang". Berkat kegiatan elite ini "apa-apa yang tetap" itu tidak menjadi semakin mengecil, menguap dan hilang, bahkan kadangkala yang telah dilupakan selama ini digali kembali untuk diolah sehingga dapat berguna sesuai dengan tuntutan keadaan.

Kiranya menjadi jelas bahwa dipandang dari sudut masyarakat dan kebudayaan, pendidikan diberikan peranan untuk memperkenalkan (inisiasi) konservasi, pengolahan, seleksi dan

pengembangan kebudayaan melalui training yang diberikannya kepada anggota masyarakat. Apabila pendidikan dapat melakukan peranan ini dengan baik, bagi manusia sebagai anggota masyarakat, kebudayaan menjadi berupa sekaligus satu pengetahuan, satu pilihan eksistensi dan satu praktek komunikasi.

Kebudayaan merupakan satu pengetahuan karena penanggapan yang sadar mengenai masa lampau dan masa kini, mengenai apa-apa yang pernah diciptakan dan yang sedang tercipta. Melalui penanggapan sadar (pengetahuan) ini manusia dibantu untuk memahami dengan tepat dirinya sendiri; hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, hubungannya dengan alam sekitarnya dan kaitan kegiatannya dengan kegiatan warga masyarakat lainnya.

Kebudayaan sebagai satu pilihan eksistensi sebab kebudayaan (sistem nilai) yang dihayati membantu manusia untuk meninjau secara tepat sikapnya terhadap dirinya sendiri dan terhadap dunia di luar dirinya, untuk memilih dengan kebebasan yang semakin mantap. Sebab kebebasan bukan fungsi dari ada-tidaknya kesempatan untuk memilih (mengenai apa saja), tetapi ditentukan oleh ada-tidaknya kesanggupan (kemampuan) bagi orang untuk memilih (mengambil keputusan). Dalam artian ini, kebudayaan yang ditanam melalui pendidikan, sangat membantu manusia untuk dapat menentukan hierarki tuntutan dan kepentingan mengenai organisasi kehidupan individu dan kehidupan kolektif.

Kebudayaan sebagai satu praktek komunikasi berhubungan ada kebutuhan dari anggota masyarakat untuk membagi pengetahuannya kepada anggota masyarakat lainnya, untuk memberitahukan apa-apa yang dipikirkannya kepada pihak lain. Masyarakat sebagai keseluruhan, demi perkembangannya yang sehat dan teratur, memang memerlukan anggota-anggota yang mampu berkomunikasi secara korek, teratur (geordned), didefinisikan secara jelas dan tercatat (recorded).

Apabila para warga masyarakat, berkat proses pendidikan, dapat menghayati dengan baik kebudayaan dalam ketiga arti

kemasyarakatan itu, maka kebudayaan yang dihayati oleh masyarakat yang bersangkutan secara berangsur-angsur terangkat ke tahap perkembangannya yang lebih lanjut, sehingga memasuki tahap sivilisasi. Dengan sivilisasi dimaksudkan tahap perkembangan kebudayaan yang dalam tubuhnya sudah mengandung penggunaan kebiasaan tulis-menulis secara luas (tradisi tulisan), kehadiran kota sebagai tempat pemukiman, terdapatnya organisasi kepolitikan, administrasi dan pemerintahan dan adanya perkembangan spesialisasi profesional.

Dengan begini berarti bahwa walaupun setiap orang dilahirkan di tengah-tengah kebudayaan dan berpartisipasi di dalam jalannya kebudayaan, walaupun kadangkala tanpa disadari, tidak setiap orang dengan sendirinya dapat berpartisipasi di dalam sivilisasi apalagi ikut memberikan sumbangan secara aktif di dalam perkembangan sivilisasi tersebut. Mengenai yang terakhir ini, pendidikan harus memungkinkan manusia untuk berbuat begitu.

Namun perkembangan kebudayaan ke arah sivilisasi bukan tidak menimbulkan masalah, baik bagi masyarakat itu sendiri maupun, dan lebih-lebih, bagi manusia sebagai anggota masyarakat. Perkembangan spesialisasi profesional, misalnya, dapat membuat manusia menjadi picik, berpandangan sempit dan menjadi terasing dari dunia (profesi) di sekitarnya. Tetapi justru pengajaran kebudayaan melalui pendidikan, baik formal dan informal, dapat memberikan imbalan terhadap keburukan-keburukan yang tampil, lebih-lebih terhadap akibat-akibat sampingan yang ditimbulkan oleh sesuatu proses pembangunan.

Semula ada anggapan bahwa kehadiran peralatan komunikasi yang dimungkinkan oleh teknik modern, dapat sangat membantu memecahkan masalah-masalah perkembangan kemasyarakatan tadi. Belakangan ternyata bahwa penggunaan peralatan modern itu lebih banyak memberikan masalah baru daripada pemecahan masalah kepada orang-orang yang bukan mengurus soal teknik dan soal keuntungan yang berkaitan dengan pembuatan peralatan itu, tetapi mengurus perkembangan kulturil

guna mengimbangi kepicikan dan ketandusan manusia di dalam perkembangan sivilisasi.

TUJUAN PENDIDIKAN DARI SUDUT ANAK-DIDIK INDIVIDUIL

Tujuan pendidikan dapat dibuat banyak sehingga merupakan satu daftar yang tidak berkesudahan. Namun di sini hendak diajukan empat tujuan pokok.

Pertama, membantu anak-didik untuk dapat memenuhi dengan baik tugas-tugas utama dari manusia. Adapun tugas-tugas utama dari manusia itu adalah (i) transformasi dirinya sendiri, (ii) auto-identifikasi mengenai dirinya dan (iii) auto-pengertian mengenai dirinya. Usaha membantu ke arah ini seharusnya diberikan dalam rangka pengertian bahwa manusia hidup dalam satu dunia organik dalam keseluruhan integralitasnya.

Kedua, mengembangkan kekuatan penalaran (the power of the reason) dari anak didik. Usaha ini harus diletakkan dalam rangka membangkitkan kesadaran belajar dan arti kreativitas. Sebab sejarah manusiawi kiranya lebih dapat dipahami apabila ia ditanggapi sebagai satu proses belajar. Sebab, seperti sudah disebut di atas, hanya dengan "belajar" inilah orang berhenti menjadi "binatang" dan berubah menjadi "manusia". Sebab, kreativitas dan bukannya penguasaan terhadap alam, yang seharusnya menjadi ukuran akhir dari keberhasilan (sukses) biologis dan kulturil dari manusia. Mengembangkan kekuatan penalaran tersebut dapat dilakukan, antara lain, melalui dua cara: (i) Berikan kepada anak-didik secara terus-menerus tantangan dan dorongan. Ajukan kepadanya masalah dan ditanyakan rationale dari setiap pemikirannya. Bangkitkan hasratnya untuk mengadakan percobaan; (ii) Ajak anak-didik untuk berkenalan dengan pemikir-pemikir masa lalu dan masa sekarang melalui karya dan ciptaan mereka.

Ketiga, membina anak-didik menjadi pengolah kebudayaan (cultuurontwikkelaar) dan tidak hanya sekedar menjadi pengemban kebudayaan (cultuurdrager).

Keempat, membantu anak-didik untuk menguasai teknologi. Hal ini penting berhubung semakin lama semakin terbukti bahwa teknologi yang dipakai di sesuatu masyarakat menentukan sekali tenaga kerja yang dapat dipekerjakan untuk menghasilkan barang dan jasa di masyarakat. Dipandang dari sudut ini, keberhasilan sesuatu sistem pendidikan formil dan informil di dalam menjalankan misinya dapat dilihat dari sampai berapa jauh manusia pekerja yang ada dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang berlaku dan sampai berapa jauh lowongan pekerjaan yang ada dapat dipenuhi oleh manusia pekerja yang tersedia semata-mata berdasarkan training yang telah diberikan kepadanya sebelumnya.

Dengan teknologi di sini dimaksudkan peralatan, permesinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa; pengetahuan yang diperlukan untuk mengadministrasikan, membangun, menjalankan, melayani dan mendistribusikan barang dan jasa tersebut di atas; semua tumpukan pengetahuan dan informasi yang digunakan dalam penggambaran dan perencanaan.

Dengan ini bukan berarti bahwa dengan penguasaan teknologi manusia dapat menikmati tingkat penghidupan yang lebih tinggi tanpa akibat sampingan. Teknologi membuat manusia menjadi semakin spesialis dan karenanya manusia, sebagai tenaga kerja, menjadi semakin tidak homogen dan semakin kurang mobil dan sulit untuk dipertukarkan atau beralih pekerjaan. Manusia menjadi semakin terikat pada sejenis pekerjaan tertentu. Maka untuk sekedar mengurangi ikatan ini, diperlukan training terus-menerus, sehingga mobilitas profesionil menjadi lebih besar.

Dipandang dari sudut masyarakat dan negara-bangsa di mana manusia menjadi anggotanya, teknologi juga diperlukan

agar supaya negara-negara yang bersangkutan dapat menarik manfaat yang sebanding di dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang sedang berjalan pesat ini. Di pihak lain guna memberikan dasar yang kukuh pada nasionalisme, sejauh nasionalisme dan kemerdekaan yang ada hendak diabdikan demi pembangkitan tingkat kemakmuran dan keadilan para warganya.

FAKTOR—FAKTOR YANG MEMBATASI HASIL PENDIDIKAN

Di dalam menjalankan misinya, pendidikan menghadapi berbagai macam faktor penghalang, antara lain :

Pertama, kemiskinan. Semakin lama ternyata pendidikan memerlukan peralatan yang semakin kompleks dan hal ini terang memerlukan biaya. Baik dipandang dari sudut perorangan maupun dari sudut masyarakat, kemiskinan per definisi, tidak memungkinkan penanggungan beban biaya pendidikan yang terlalu tinggi.

Kedua, berbagai macam kekeliruan. Sesedikitnya ada empat kekeliruan pokok yang benar-benar dapat mereka menekan keberhasilan sesuatu usaha pendidikan. (i) Ide bahwa segala sesuatu yang harus dipelajari di dalam penghidupan ini dapat dan/atau harus diajarkan melalui sistem "sekolah". Kepalsuan ide ini antara lain yang membuat orang tua lupa akan tugas mereka sebagai pendidik penting bagi anak mereka. (ii) Ide bahwa sekolah semata-mata harus membuat anak-didik menjadi manusia sosial, berintegrasi dan bekerjasama di dalam masyarakat, selalu dapat menyesuaikan diri pada lingkungannya. Memang tidak dapat diungkiri bahwa ide semacam ini ada benarnya, tetapi tujuan persekolahan bukan hanya ini. Tujuan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sekolah harus dapat membuat anak-didik sanggup berdiri sendiri. mempunyai dan menghargai individuilitas (bukan individualisme), sebab di dalam penghidupan selalu setiap manusia harus dapat menghadapi segala sesuatu seorang diri. Individualitas bahkan sema-

kin diperlukan di dalam jaman di mana terhadap ancaman perkembangan kebudayaan massal, setiap manusia harus sanggup mempertahankan kemerdekaan diri-pribadinya. (iii) Ide bahwa pendidikan adalah satu proses yang sama sekali berhenti dengan selesainya tahap pendidikan formil. (iv) Ide bahwa belajar dan pengajaran harus dapat memberikan hasil yang cepat, manfaat materiil yang segera dan membantu pencapaian sukses secepat mungkin.

Ketiga, kekikiran di dalam memberikan pengetahuan, larangan dan atau tabu di dalam penerusan ilmu dan pengalaman.

PENDIDIKAN SWASTA

Pendidikan swasta mempunyai hak hidup dan tempat yang terhormat di samping pendidikan yang diusahakan oleh pemerintah. Hak ini bukanlah karena pemerintah belum atau tidak sanggup memberikan pendidikan kepada setiap warganya. Walaupun pemerintah sudah sanggup untuk menyediakan tempat di dalam dunia pendidikan kepada setiap warganya yang memerlukan dan pantas memperoleh pendidikan, pendidikan swasta tetap mempunyai hak hidup berdasarkan alasan-alasan berikut :

Pertama, keluarga adalah sel dasar dari masyarakat. Karenanya, seorang anak, sebelum menjadi bagian dari masyarakat dan/atau negara-bangsa, merupakan anggota dari keluarganya. Berhubung dengan ini orang tua berkewajiban terhadap pendidikan anaknya, dengan perkataan lain, bertanggung jawab terhadap pemilihan keseluruhan nilai yang kelak menjadi kekayaan intelektual dan moril dari anaknya. Di dalam jaman yang sudah semakin kompleks ini, bertanggung jawab terhadap pendidikan, berarti memilih sekolah, tidak hanya antara jenis pendidikan, pemerintah ataupun swasta, tetapi lebih jauh dari itu; pemilihan mengenai metode paedagogis yang diterapkan, pemilihan korps pengajar, suasana pemberian pengajaran sehari-hari.

Kedua, pemilihan pendidikan tersebut di atas, hanya mungkin bila terdapat dua kondisi. Di satu pihak, adanya kebebasan bagi setiap orang, ataupun kelompok orang, yang diakui memenuhi syarat pendidikan, untuk mendirikan persekolahan dan menawarkannya kepada seluruh keluarga yang ada di masyarakat. Di lain pihak, persamaan pendidikan betapapun keadaan keuangan dan beban yang dipunyai oleh masing-masing keluarga.

Ketiga, yang harus menjamin kebebasan dan persamaan tersebut di atas adalah negara. Artinya, negara harus menjamin adanya kemungkinan pemilihan pendidikan bagi para orang tua mengenai tempat persekolahan di mana anaknya akan dipercayakannya. Dipandang dari sudut pendidikan swasta, hal tersebut berarti adanya paritas (kedudukan yang sama) antara dirinya dengan diri pendidikan pemerintah di bidang, antara lain, bantuan finansial dan perlakuan kepada para pengajar. Sebagai imbalannya, pendidikan swasta harus sanggup membuktikan tingkat kompetensi (kesanggupan) yang sama tingginya dengan yang ada di sektor pendidikan pemerintah dan mutu pengurusan administrasi pendidikan yang sama sempurnanya dengan yang terdapat di pendidikan pemerintah.

Walaupun bantuan finansial dan materiil dari pemerintah, atas nama negara, kepada pendidikan swasta memang wajar, berdasarkan jalan pikiran di atas, namun tidak boleh dilupakan oleh pendidikan swasta bahwa setiap bantuan negara adalah bersyarat dan karenanya mengikat. Syarat dan ikatan itu bukan berarti harus lebih berat dari syarat dan ikatan yang diminta oleh negara dari lembaga pendidikan yang didirikannya sendiri. Syarat dan ikatan itu harus sama. Namun biar bagaimanapun setiap syarat dan ikatan pasti mengurangi kebebasan. Maka demi kebebasan ini seharusnya setiap lembaga pendidikan swasta tidak terlalu cepat dan mudah mencari bantuan dari negara. Bahkan bila mungkin, harus dapat berdiri dan bekerja tanpa bantuan negara demi mempertahankan kebebasan itu. Sebab, salah satu pertimbangan pokok mengapa memilih status swasta itu adalah justru demi adanya kebebasan di dalam memilih falsafah yang dijadikan pegangan di dalam mendirikan sistem

pendidikan yang dipilihnya sendiri. Juga jangan dilupakan bahwa setiap bantuan negara bersumber pada hasil perpajakan yang ditarik dari masyarakat banyak. Dipandang dari sudut ini adalah kurang tepat bila kebebasan yang hendak dinikmati oleh pendidikan swasta harus dibiayai dari sumber yang ditarik dari setiap anggota masyarakat yang belum tentu secara langsung turut menarik manfaat dari kebebasan yang dinikmati oleh kelompok pendidikan swasta itu. Artinya, adalah wajar bila negara memberikan syarat dan ikatan bagi setiap bantuan yang diberikannya dan adalah perbuatan yang cukup terhormat bila setiap orang berusaha menanggung sendiri beban dari pendirian dan kebebasan yang ingin dipertahankannya.

Mempunyai pendidikan yang independent saja tidak cukup, ia harus disertai kesanggupan untuk menanggung beban kemerdekaan yang dipilihnya sendiri itu. Hal ini juga berlaku bagi setiap kelompok yang berusaha mendirikan sesuatu pendidikan nonpemerintah.

La noblesse oblige !

PELEMBAGAAN POLA HIDUP SEDERHANA

Kirdi DIPOYUDO

Pada 27 Mei 1978 Presiden Soeharto memberikan instruksi kepada Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim untuk menjabarkan lebih lanjut "pola hidup sederhana" agar benar-benar menjadi operasional, termasuk pelaksanaan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan bagi pelanggar-pelanggarnya. Dalam rangka itu perlu dikembangkan ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk membatasi pola hidup sederhana dan mengetahui bila terjadi penyimpangan dari gaya hidup yang wajar. Atas pertanyaan apakah Keputusan Presiden 5 Maret 1974, yang menggariskan patokan-patokan umum bagi pegawai negeri untuk melaksanakan pola hidup sederhana, sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik, Menteri Emil Salim menjawab: "Kalau Presiden tidak menganjurkan penjabaran ini, tentunya pola itu sudah dianggap berjalan". Dengan demikian dikeluarkannya instruksi itu merupakan suatu petunjuk bahwa keputusan itu belum dijalankan secara memadai, dan bahwa pemerintah bertekad untuk melaksanakannya. Hal ini dapat disambut dengan baik karena seperti akan kita lihat di bawah, hidup sederhana adalah sangat penting bagi suksesnya pembangunan nasional yang sedang berjalan. Oleh sebab itu masalah pelebagaan pola hidup sederhana ini perlu mendapat perhatian yang memadai.

Dalam membahas persoalan ini, sebaiknya kita bertolak dari Keputusan Presiden tersebut. Keputusan itu membatasi kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah dan kesederhanaan hidup, dan merupakan implementasi keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional tanggal 22 Januari 1974, yang memuat sejumlah patokan pola hidup sederhana bagi pejabat-pejabat pemerintah. Dia mewajibkan pegawai negeri untuk hidup sederhana dan memuat sejumlah larangan untuk membatasi kegiatan-kegiatannya. Pertama-tama semua pegawai negeri, termasuk anggota ABRI dan instansi-instansi pemerintah, dilarang menghambur-hamburkan uang negara. Antara lain mereka dilarang memberikan pelayanan yang berlebihan kepada pegawai negeri yang mengadakan kunjungan ke daerah mereka, baik dalam rangka tugas rutin maupun tugas khusus lainnya, seperti kunjungan kerja, peresmian suatu proyek, penelitian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan pelayanan yang berlebihan antara lain ialah penyambutan dengan resepsi, pesta atau pengawalan dan penghormatan yang melebihi ketentuan yang berlaku, lagi pula pemberian hadiah atau tanda kenang-kenangan berupa apapun. Mereka juga dilarang menyelenggarakan hari ulang tahun departemen, instansi pemerintah, perusahaan milik negara, satuan ABRI dan badan resmi lainnya dengan pesta, selamat atau acara-acara lain yang serupa, tetapi harus melakukannya secara sederhana dengan upacara bendera. Mereka juga tidak boleh menguasai atau menggunakan kendaraan yang tergolong mewah atau lebih dari satu kendaraan dinas, biarpun menduduki lebih dari satu jabatan. Mobil-mobil mewah yang sejauh itu mereka kuasai atau gunakan harus diserahkan kepada Sekretariat Negara, sedangkan mobil-mobil dinas lainnya (lebih dari satu) harus diserahkan kepada instansi masing-masing. Akhirnya mereka juga dilarang menempati lebih dari satu rumah dinas, dan rumah-rumah dinas lainnya harus diserahkan kepada instansi yang bersangkutan. Pendek kata, pegawai negeri dilarang menggunakan uang negara secara leluasa seperti sebelumnya dan harus melakukannya secara ekonomis dan bertanggung jawab untuk keperluan-keperluan semestinya.

Selain itu semua pegawai negeri dan isteri mereka tidak boleh menghamburkan uang mereka sendiri. Khususnya mereka tidak boleh memasuki tempat-tempat perjudian, klub malam, permandian uap dan tempat-tempat lain serupa itu. Selanjutnya perayaan-perayaan yang bersifat pribadi seperti perkawinan, khitanan dan lain sebagainya harus diselenggarakan secara sederhana dan tidak berlebihan dalam arti bahwa untuk satu peristiwa tidak boleh diselenggarakan upacara atau acara lebih dari dua kali dan setiap acara tidak boleh dikunjungi lebih dari 250 pasangan undangan. Perjalanan ke luar negeri juga harus dibatasi sebanyak mungkin. Perjalanan luar negeri untuk kepentingan pribadi tidak boleh dilakukan tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Selain itu pegawai negeri dilarang menerima hadiah atau pemberian lain yang serupa dalam bentuk apapun kecuali dari suami atau isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti hari ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa, kecuali bila adat belum memungkinkannya. Pada kesempatan-kesempatan lain dia dilarang menerima hadiah atau pemberian lain yang serupa dalam bentuk apapun juga jika mengetahui atau patut dapat menduga, bahwa pihak pemberi mempunyai maksud yang bersangkutan paut atau mungkin bersangkutan paut secara langsung atau tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaannya.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut setiap pimpinan departemen, instansi pemerintah, perusahaan milik negara, satuan ABRI dan badan resmi lainnya diwajibkan memberikan instruksi atau petunjuk bagi pelaksanaannya, menjadi teladan bagi bawahannya, mengadakan pengawasan dan mengambil tindakan-tindakan terhadap pelanggar-pelanggar. Untuk menegakkan pelaksanaannya dapat digunakan sebagai sanksi hukuman jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952 dan hukuman pidana berdasarkan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukuman pidana lain berdasarkan KUHP.

Secara juridis patokan-patokan pola hidup sederhana tersebut hanya berlaku untuk pegawai negeri, termasuk anggota ABRI dan pejabat instansi-instansi pemerintah, akan tetapi menurut penjelasan pemerintah pola hidup sederhana itu harus menjadi suatu gerakan nasional. Seruan hidup sederhana itu ditujukan kepada mereka yang mampu dan hidup secara mewah, tidak kepada mereka yang tidak mampu atau mampu tetapi menggunakan kekayaan mereka untuk kegiatan produktif. Akan tetapi secara istimewa seruan itu dimaksud untuk pegawai negeri, terutama pejabat-pejabat pimpinan, karena mereka ini harus menjadi "panutan" bagi masyarakat. Bagi mereka hidup sederhana seperti dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan itu bukan hanya merupakan suatu kewajiban moral, melainkan juga suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dengan ancaman hukuman.

Sebagai gerakan nasional, pola hidup sederhana tidak hanya meliputi hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, tetapi lebih luas dan mencakup hal-hal yang menurut pandangan masyarakat merupakan tuntutan hidup sederhana pada tahap pembangunan ekonomi nasional dewasa ini. Tingkat konsumsi tidak boleh melebihi apa yang benar-benar dibutuhkan orang masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya dalam masyarakat. Selain menghindari konsumsi mewah, orang-orang harus juga menghentikan pengeluaran-pengeluaran yang merupakan pemborosan.

Beberapa hal telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan keputusan mengenai hidup sederhana itu. Di kota-kota besar makin terasa adanya sikap boros dan gaya hidup mewah yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat di tengah gejolak pembangunan yang memerlukan pengerahan segala tenaga dan dana yang tersedia. Kelompok yang terdiri atas pejabat-pejabat dan pengusaha-pengusaha yang dekat dengan mereka ini suka meniru gaya hidup golongan atas di negara-negara yang telah maju dan menunjukkan suatu pola hidup yang mewah. Pola hidup mewah ini tidak hanya meliputi konsumsi barang merah, tetapi juga cara-cara hidup mewah seperti berliburan mahal,

berlangganan butik dan salon kecantikan, kebiasaan mengunjungi tempat-tempat judi, klub-klub malam, panti-panti pijat, pemandian uap dan lain sebagainya. Kesenangan dengan kemewahan itu juga terungkap dalam kecenderungan instansi-instansi pemerintah untuk membangun gedung-gedung dan kantor-kantor yang megah, menggunakan mobil mewah, perlengkapan kantor yang serba hebat dan sebagainya. Pendek kata, sejak Proklamasi Kemerdekaan tidak pernah sekian banyak uang dikeluarkan untuk kemewahan oleh begitu sedikit orang.

Gaya hidup itu jauh melebihi kemampuan pertumbuhan ekonomi dan oleh sebab itu menghambat pembangunan. Lebih dari itu, dia tidak terpicul oleh kekuatan ekonomi nasional dewasa ini, lagi pula merongrong kesetiakawanan sosial, yang justru harus ditingkatkan untuk menghadapi dan menundukkan tantangan-tantangan pembangunan. Sama sekali tidak dapat dibenarkan pendapat yang menghalalkan gaya hidup mewah, biarpun yang dibelanjakan itu adalah hasil usaha sendiri, karena milik pribadipun mempunyai fungsi sosial. Selain itu gaya hidup mewah memboroskan dana-dana yang seharusnya dikerahkan untuk pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang masih sangat rendah.

Gaya hidup mewah itu lebih tidak masuk akal kalau dibandingkan dengan taraf hidup sebagian terbesar rakyat, yang kecil pendapatannya dan kurang untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari secara yang layak bagi kemanusiaan. Sebagian besar pendapatan mereka harus dibelanjakan untuk membeli pangan, sehingga mereka kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti sandang, perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Lagi pula gaya hidup mewah lapisan kecil masyarakat di tengah-tengah rakyat yang miskin dan hidup dalam keadaan serba kekurangan itu sangat mempersulit usaha untuk membina solidaritas sosial demi suksesnya pembangunan dan merupakan suatu bom waktu, terutama karena rakyat banyak tahu bahwa sebagian besar kekayaan yang dihabur-hamburkan itu diperoleh dengan cara-cara tak halal yang sangat merugikan mereka, seperti korupsi,

komersialisasi jabatan, manipulasi, penyuapan pegawai negeri, penyelundupan, penggelapan pajak dan sebagainya.

Seruan hidup sederhana itu terutama dimaksud untuk meningkatkan pembangunan nasional dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada dan menggunakan seefektif dan se-efisien mungkin. Suatu bangsa yang sedang membangun dan rendah pendapatan per jiwanya seperti Indonesia harus hidup hemat dan membatasi konsumsinya pada kebutuhan-kebutuhan pokok, agar dapat menabung dan meningkatkan investasi guna hari depan yang lebih baik. Sehubungan dengan itu pola hidup sederhana harus disertai usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dan mobilisasi tabungan masyarakat lewat bank-bank, lembaga-lembaga asuransi dan tabungan perusahaan-perusahaan berupa penanaman kembali keuntungan-keuntungan, paling tidak untuk sebagian.

Seruan hidup sederhana itu juga dimaksud sebagai langkah untuk melengkapi berbagai kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kedudukan serta kekuasaan pegawai negeri yang menempati jabatan-jabatan vital, dan sekaligus untuk mencegah para pejabat disangka dan didakwa melakukan korupsi oleh masyarakat, yang tahu bahwa tidak mungkin mereka menjadi kaya raya semata-mata dari gaji dan tunjangan-tunjangan mereka. Pada tanggal yang sama pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang antara lain melarang pegawai negeri dan isterinya untuk mempunyai perusahaan-perusahaan swasta atau memimpinya dan untuk melakukan usaha dagang. Semuanya itu dimaksud untuk meningkatkan daya guna aparatur pemerintah dan menjamin keberhasilan pembangunan nasional.

Anjuran hidup sederhana itu bukan soal baru. Tujuh belas tahun sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan seruan serupa lewat Gerakan Hidup Baru, yang diolah Dewan Nasional dan diumumkan Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraannya tanggal 17 Agustus 1957. Tujuannya ialah melancarkan suatu revolusi mental, mengembalikan cita-cita revolusi 17 Agustus

1945 dan merombak masyarakat agar memperoleh kembali kepribadian nasionalnya yang telah dekaden. Hidup sederhana khususnya harus dikembangkan pada lapisan atas masyarakat. Sehubungan dengan itu godaan barang-barang asal luar negeri harus disingkirkan dan impornya dibatasi. Kesadaran berproduksi dan penghargaan terhadap barang-barang buatan dalam negeri perlu dikembangkan. Akan tetapi gerakan itu tidak panjang umurnya dan patah di tengah jalan, seperti pola hidup sederhana yang beberapa tahun sebelumnya dijadikan program kabinet Wilopo dan anjuran-anjuran serupa lainnya. Salah satu sebab pokok kegagalan itu ialah karena para pemimpin yang menggembarkan hidup sederhana itu hidupnya jauh dari sederhana. Kebanyakan tidak melaksanakan apa yang mereka anjurkan. Dalam suatu masyarakat yang masih memiliki mental feodal yang kuat seperti masyarakat Indonesia, teladan pimpinan lebih menentukan bagi berhasilnya suatu kebijaksanaan pemerintah dari pada dalam masyarakat yang semangat demokratisnya telah tebal.

Seruan hidup sederhana yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden itu dapat dan pada umumnya juga disambut dengan gembira sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh perlu demi lancarnya roda pemerintahan dan sukses pembangunan. Pada tahap perkembangan ekonomi Indonesia sekarang ini, rakyat termasuk pegawai negeri harus hidup sederhana dan menabung untuk meningkatkan investasi dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai sejauh ini. Bukan saja penerimaan negara harus ditingkatkan, tetapi uang negara yang tersedia harus digunakan se-efisien mungkin dan harus dihindari pemborosan-pemborosan serta pengeluaran-pengeluaran yang belum perlu atau belum pada waktunya. Hal itu juga berlaku bagi kekayaan swasta, yang seperti dikemukakan di atas juga mempunyai fungsi sosial.

Gerakan hidup sederhana harus dimulai dan dipelopori oleh aparaturnya sendiri. Pegawai negeri, terutama yang memegang jabatan pimpinan, tidak cukup menggembarkan hidup sederhana, tetapi pertama-tama harus memberikan tela-

dan. Oleh sebab itu sangat tepatlah ketentuan-ketentuan bahwa pegawai negeri diwajibkan mengeluarkan uang negara atas dasar kepentingan dan tujuan yang tepat, secara hemat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianpun ketentuan-ketentuan bahwa pegawai negeri dan isterinya diwajibkan menggunakan uang pribadi mereka secara hemat dan menggunakan-kelebihannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif atau sosial. Salah satu cara yang paling baik dan efektif ialah menggunakan kekayaan pribadi untuk ikut memperluas kesempatan kerja produktif yang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat mendesak di Indonesia. Secara demikian akan terjadi sekaligus peningkatan produksi dan pendapatan nasional serta pemerataan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Selain itu kemungkinan pelaksanaannya adalah lebih besar dari pada waktu yang lampau. Keputusan Presiden pada dirinya memuat jaminan-jaminan bahwa ketentuan-ketentuannya akan dilaksanakan. Pegawai negeri yang melanggar peraturan-peraturannya akan dijatuhi hukuman jabatan dan hukuman pidana sesuai dengan UU anti tindak pidana korupsi dan KUHP. Pejabat-pejabat pimpinan tidak hanya diwajibkan memberi petunjuk pelaksanaan dan contoh kepada bawahan mereka, tetapi juga mengadakan pengawasan dan menindak mereka yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan itu.

Namun semuanya itu ternyata belum cukup, khususnya karena tiada jaminan secukupnya bahwa pengawasan itu akan benar-benar dilakukan dan bahwa sanksi-sanksi itu akan dikenakan pada para pelanggar. Tetapi justru di sinilah salah satu pokok kelemahan kita. Banyak peraturan bagus kita buat tetapi tidak berguna karena tidak dilaksanakan. Apa yang terjadi kerap kali bertolak belakang dengan peraturan-peraturan itu. The rule of law lebih merupakan suatu slogan yang muluk dari pada kenyataan. Soalnya bukanlah semata-mata merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan perundangan yang tepat, melainkan terutama juga menjamin pelaksanaannya secara efektif. Dan salah satu jaminan pelaksanaan yang penting ialah adanya pengawasan yang saksama. Akan tetapi di sini terdapat

pokok kelemahan kita lain. Mekanisme pengawas kita, baik intern seperti inspektorat jenderal dalam departemen masing-masing maupun ekstern seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pengawas Keuangan kurang berfungsi. Demikianpun pers kita. Secara jujur harus diakui bahwa kurang dilaksanakannya peraturan-peraturan perundangan sejauh ini sebagian besar adalah akibat kurangnya pengawasan yang efektif. Dalam keadaan serupa itu Keputusan Presiden tentang hidup sederhana tersebut mengalami nasib peraturan-peraturan perundangan lain. Seperti dikatakan di muka, itulah sebabnya mengapa Presiden Soeharto memberikan instruksi untuk menjabarkan lebih lanjut pola hidup sederhana agar pola itu benar-benar menjadi operasionil.

Oleh sebab itu sistem hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara seperti diatur dalam UUD 1945 perlu dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam bidang keuangan juga Badan Pengawasan Keuangan harus meningkatkan kegiatannya mengawasi pelaksanaan REPELITA, APBN tahunan dan peraturan-peraturan perundangan. Demikianpun inspektorat-inspektorat jenderal dalam departemen-departemen dan pers yang bebas tetapi bertanggung jawab. Juga peranan pemimpin di setiap tingkatan aparatur pemerintah harus lebih dimanfaatkan dari pada praktik selama ini. Pegawai atasan tidak hanya diharap memberikan instruksi kepada pegawai-pegawai bawahannya, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan pola hidup sederhana itu juga dirasa mendesak pembentukan suatu peradilan administrasi tersendiri, yang akan mengadili pegawai-pegawai negeri yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut tanpa pandang bulu. Selain itu diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah lain dalam bidang fiskal dan perdagangan. Pola konsumsi dapat dikendalikan dengan suatu sistem bea masuk dan perpajakan yang dapat mengurangi pengadaan barang-barang mewah. Pemerintah kiranya juga perlu mengawasi iklan-iklan barang mewah yang melakukan manipulasi terhadap kehidupan masya-

rakat dengan menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak atau belum perlu. Pendeknya, ekonomi liberal yang membuka Indonesia untuk pembentukan kekayaan yang hanya dapat dinikmati oleh suatu minoritas kecil dan yang kurang memperhatikan nasib rakyat banyak harus diganti oleh suatu sistem yang lebih terarah pada kesejahteraan rakyat banyak. Tekanan dan prioritas harus diberikan kepada produksi dan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang mencukupi. Sehubungan dengan itu strategi pembangunan industri dan politik perdagangan luar negeri perlu ditinjau kembali.

Di samping peraturan-peraturan tersebut kiranya juga perlu digiatkan usaha-usaha untuk merubah pandangan yang sejauh ini berlaku tentang status dan kedudukan pegawai negeri, baik di kalangan mereka sendiri maupun di kalangan rakyat. Se jauh ini pejabat-pejabat tidak pertama-tama dilihat sebagai abdi masyarakat, melainkan sebagai penguasa dan pembesar, sehingga dianggap wajar bahwa mereka dilayani oleh rakyat dan hidup mewah secara menyolok. Tetapi sesuai dengan sila ketiga Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, harus dibina kesadaran bahwa pegawai negeri bukanlah pertama-tama seorang pembesar, melainkan seorang abdi masyarakat yang digaji dengan uang rakyat untuk melayani kepentingan-kepentingan rakyat, seperti berulang kali ditandaskan oleh Presiden Soeharto, antara lain dalam Pidato Kenegaraan 15 Agustus 1974, dan dikukuhkan dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Hal ini tidaklah mudah karena melibatkan sikap-sikap yang berakar pada kebudayaan. Namun tugas itu harus dilaksanakan demi lancarnya roda pemerintahan dan suksesnya pembangunan nasional

Sebagai penutup dapat dikatakan bahwa instruksi Presiden Soeharto untuk menjabarkan lebih lanjut pola hidup sederhana yang telah digariskan dalam Keputusan Presiden tahun 1974 harus benar-benar dilaksanakan, sehingga hidup sederhana menjadi suatu gerakan nasional yang mengikutsertakan seluruh bangsa. Pola hidup sederhana, jika dilaksanakan dengan baik,

hususnya oleh pegawai negeri yang memegang pimpinan, akan memperlancar roda pemerintahan dan menunjang usaha pembangunan, dan bahkan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya. Karena secara demikian uang negara akan digunakan secara efisien dan tabungan masyarakat akan meningkat. Apabila para pejabat hidup sederhana sesuai dengan seruan Kepala Negara itu, rakyat yang mampu akan meniru mereka, menghentikan atau paling tidak mengurangi pemborosan-pemborosan, hidup hemat dan menggunakan kelebihan kekayaan mereka untuk kegiatan-kegiatan produktif. Lagi pula suasana hidup sederhana akan mengurangi godaan untuk mencari uang dengan cara manapun, termasuk korupsi, manipulasi, penggelapan pajak, komersialisasi jabatan, pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya. Dengan demikian daya guna aparat pemerintah akan meningkat, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

SUATU DILEMMA UNTUK IBU-IBU YANG BEKERJA

(Dengan fokus terhadap ibu-ibu rumah tangga di kota yang bekerja di luar rumahnya)

Onny. S. PRIJONO

PENDAHULUAN

Apabila melihat kepada sejarah perkembangan kedudukan wanita di kota maka ternyata bahwa peranan wanita mulai makin menonjol di dalam masyarakat. Menurut konsep yang tradisionil, peranan dari wanita selalu dikaitkan dengan rumah, dapur dan anak. Akan tetapi karena perkembangan masyarakat ternyata konsep ini tidak dapat bertahan dan terjadilah perubahan sosial di mana wanita "meninggalkan rumah" untuk bekerja. Wanita yang bekerja, merupakan suatu fenomena sosial dari masyarakat yang telah meninggalkan nilai-nilainya yang tradisionil.

Kesempatan untuk bekerja bagi wanita makin lama makin terbuka lebar serta jumlahnya pun secara kuantitas makin bertambah banyak. Kesempatan untuk bekerja ini seiring dengan kesempatan bagi wanita untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan. Terutama di kota-kota besar kesempatan bagi wanita untuk memperoleh pendidikan tidak mengalami halangan maka kesempatan lapangan pekerjaan bagi wanitapun makin terbuka lebar. Pekerjaan yang dahulu belum pernah dijamah oleh wanita sekarang sudah mulai ditangani oleh wanita, kedudukan yang dahulu belum pernah dipegang oleh wanita sekarang sudah mulai diduduki oleh wanita. Sebagai akibat dari perubahan sosial ini maka peranan di dalam keluarga juga mengalami

proses perubahan yang akan menuntut partisipasi yang lebih besar dan aktif dari para suami di dalam keluarga.

Adapun yang merupakan motif dari wanita untuk bekerja adalah untuk membantu menunjang kebutuhan keluarganya atau untuk kepentingan dirinya sendiri karena telah memperoleh pendidikan dan ingin mempraktekannya serta mengembangkannya. Apapun yang merupakan latar belakang dari fenomena ini baik sosial, ekonomi, politik atau alasan psikologis, di dalam kenyataannya jumlah ini makin bertambah secara kuantitatif.

Di dalam tulisan ini kami akan memfokuskan pada ibu-ibu yang telah berumah tangga yang mempunyai pekerjaan di luar rumahnya dengan situasi di kota, permasalahan-permasalahan yang dihadapinya di dalam keluarganya, lingkungannya maupun di dalam dirinya sendiri, yang akan dikemukakan secara deskriptif.

MASALAH YANG DIHADAPI IBU—IBU YANG BEKERJA DI DALAM SITUASI LINGKUNGANNYA

Ibu-ibu yang bekerja — merupakan suatu perubahan sosial di dalam masyarakat tradisional. Oleh karena menurut nilai-nilai tradisional tempat dari seorang ibu adalah di rumah untuk mengurus anak-anaknya beserta suaminya. Peranannya hanya terbatas pada rumah, dapur dan anak. Statusnya hanyalah sebagai seorang ibu dan isteri.

Seorang ibu yang meninggalkan rumah untuk bekerja, seringkali harus mengalami celaan dari orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga maupun kerabatnya. Terutama di dalam masyarakat yang masih tradisional di mana pengontrolan sosialnya masih ketat, oleh karena tindakan tersebut dipandang sebagai menyimpang dari norma masyarakat. Apalagi kalau ibu tersebut bekerja bukan atas dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis. Dalam hal ibu-ibu bekerja, tindakan tersebut dipandang oleh masyarakat yang masih menganut nilai-

nilai tradisional sebagai mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai isteri, terutama apabila mempunyai anak yang masih kecil dipandang sebagai menterlantarkan anak-anaknya. Hal tersebut dapat mempengaruhi si ibu apabila tidak mendapat support/dukungan dari lingkungan sekitarnya. Ini dapat mempengaruhi pekerjaannya maupun dirinya sendiri yang dapat mengurangi keyakinan terhadap dirinya.

Menghadapi lingkungan masyarakat yang masih tradisional dengan pengontrolan sosial yang ketat dapat merupakan masalah mental yang harus dihadapi oleh seorang ibu yang bekerja. Jadi biarpun wanita telah memperoleh haknya untuk bekerja akan tetapi ia masih mengalami kesulitan di dalam menghadapi norma-norma serta kebiasaan-kebiasaan yang telah dilembagakan yang berada di sekitarnya.

Kenyataan lain yang harus dihadapi oleh ibu-ibu yang bekerja adalah kehilangan atau terputusnya kontak dengan teman-teman lama maupun dengan ibu-ibu lain yang tinggal di rumah. Hubungan ini tidak lagi seintim semasa sebelum ia bekerja yang antara lain disebabkan karena kesibukan yang bertambah. Mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk berkunjung ke rumah temannya. Terjadinya perubahan di dalam kehidupan mereka merupakan hal yang wajar sebagai konsekwensinya ia bekerja.

Ibu yang bekerja berada di dalam lingkungan yang baru, yaitu lingkungan pekerjaannya. Di dalam lingkungan pekerjaannya ia seringkali harus membuktikan kemampuannya sebagai wanita yang sanggup menangani pekerjaannya. Apalagi kalau ia berada di dalam lingkungan yang mayoritasnya adalah pria maka ia tidak mau memperlihatkan diri sebagai kaum yang lemah karena kalau ia tidak dapat membuktikan kemampuannya ia takut kalau diremehkan sebagai wanita, kaum yang lemah. Dan karena assumsi wanita sebagai seks kedua, yang selalu dinomor duakan maka acapkali ia tidak mempunyai keberanian untuk bersaing dengan kaum pria di dalam hal pekerjaannya maupun di dalam pencapaian kariernya.

Konsentrasi/pemusatan pikiran terhadap pekerjaannya pada waktu-waktu tertentu dapat terganggu sebagai akibat dari pada emosi yang terganggu, misalnya apabila ia harus meninggalkan anaknya di rumah dalam keadaan sakit. Gangguan tersebut dapat memberi efek yang negatif terhadap pekerjaannya yang tentunya mengakibatkan produktivitas kerjanya menurun. Lain halnya dengan seorang suami, ia jarang membawa persoalan rumahnya ke tempat pekerjaannya.

MASALAH IBU—IBU YANG BEKERJA DI DALAM KONTEKS KELUARGANYA

Menurut konsep perkawinan yang konvensional, sepasang suami-isteri ketika memasuki jenjang perkawinan mengharapkan tuntutan-tuntutan dari sesamanya walaupun ini tidak diutarakan. Tentunya kedua-duanya mengharapkan agar perkawinannya menjadi perkawinan tunggal dalam arti monogami. Di dalam konteks ini berarti bahwa mulai ada pembatasan-pembatasan (keterbatasan-keterbatasan ??). Si isteri mengurus rumah dan anak-anak, sebaliknya si suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sejak dahulu kala ini sudah menjadi suatu kompromi umum antara suami-isteri. Akan tetapi lama kelamaan konsep mengenai perkawinan dan kehidupan berkeluarga mengalami perubahan secara perlahan-lahan, terutama dengan meningkatnya jumlah ibu-ibu yang mengambil peranan di luar rumah yaitu dengan bekerja. Pada umumnya kebanyakan ibu-ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya karena apabila hanya mengharapkan penghasilan dari suaminya saja maka ini tentu tidak mencukupi terutama di kota-kota di mana tingkat penghidupannya relatif lebih tinggi. Di samping itu ada pula yang bekerja karena alasan pribadi yang kompleks. Apapun yang menjadi motif bagi seorang ibu untuk bekerja, sebagai konsekwensinya kehidupan keluarganya akan mengalami perubahan di dalam beberapa hal. Perubahan sosial yang terjadi di mana si ibu bekerja di luar rumah mengakibatkan perubahan peranan di dalam kehidupan keluarganya. Supaya kehidupan keluarganya tidak mengalami kegoncangan sebagai akibat dari pada perubahan sosial tersebut maka harus ada

keseimbangan antara peranan ibu dan bapak. Maka terjadilah perubahan di dalam konsep keluarga, di mana urusan atau hal-hal yang berhubungan dengan keluarga tidak dibebankan kepada si ibu saja tetapi si suami turut mengambil peranan yang aktif di dalam kehidupan keluarga. Si ibu berusaha untuk mengimbangi tanggung jawabnya mengurus anak-anak dan pekerjaannya sedangkan suaminya sekarang juga berperan di dalam soal mengurus anak maupun rumah tangga. Pada umumnya para bapak atau ayah baru terlibat atau turut campur tangan di dalam hal ini apabila para ibu tidak dapat menanganinya sendiri atau tidak dapat mengambil keputusannya sendiri. Walaupun pada akhirnya segala pelaksanaannya kembali ke tangan si ibu. Mencari seorang pembantu rumah tangga dan orang yang akan mengurus anak-anak dirumah selazimnya menjadi tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Hal ini mungkin disebabkan, pertama, karena para ibu merasa ini adalah kewajiban serta tanggung jawabnya oleh karena mereka adalah ibu dari anak-anak tersebut. Di samping itu apabila mereka ingin bekerja dan sekaligus ingin menjadi ibu maka mereka harus mencari jalan keluar bagaimana mengurus anak-anaknya. Kedua, banyak wanita yang merasa bahwa pekerjaannya kalah pentingnya dibandingkan dengan pekerjaan suaminya. Oleh karena itu mereka beranggapan apabila suaminya turut campur di dalam hal ini berarti hanya membuang waktu yang berharga atau tenaga saja.

Walaupun terjadinya perubahan sosial ini dengan bekerjanya ibu-ibu menuntut peranan yang lebih aktif dari para suami di dalam soal rumah tangga dan mengurus anak-anak, akan tetapi di kota-kota besar umumnya, perubahan ini tidak mempunyai efek yang terlalu besar di dalam peranan bapak dalam soal rumah tangga maupun mengurus anak oleh karena adanya kehadiran figur pembantu rumah tangga dan orang lain sebagai substitusi ibu di dalam keluarga. Pada umumnya ibu-ibu bekerja apabila mereka memperoleh bantuan dari orang lain, apakah itu pembantu rumah tangga atau keluarga, yang dapat mengurus soal rumah tangga dan anak-anak. Banyak di antara ibu-ibu pula yang menunggu bertahun-tahun sampai anaknya mencapai usia sekolah baru bekerja.

Masalah yang seringkali dihadapi oleh seorang ibu, apakah adil apabila ia bekerja dan apakah ia dapat dibenarkan untuk bekerja. Seringkali ia berpikir dan terlintas di dalam pikirannya, itu adalah anak-anak saya sendiri dan bukan anak-anak pembantu ataupun orang lain. Dia akan merasa kehilangan masa tingkat perkembangan anaknya yang tahap demi tahap, yang tidak sempat ia ikuti dan alami dengan seksama. Apakah benar apabila anak-anak ditinggalkan terlalu cepat pada usia yang masih relatif sangat muda akan memberikan efek terhadap perkembangan maupun pertumbuhan fisik mereka. Apakah dengan bekerja kehidupan berkeluarga akan terganggu atau anak-anaknya akan terganggu baik fisik maupun psikis. Pertanyaan yang seringkali dilontarkan kepada ibu-ibu yang bekerja adalah bagaimana dengan anak-anak apabila anda bekerja atau orang-orang langsung menyatakan perasaan yang kasihan terhadap anak-anak tersebut seolah-olah anak-anak itu ditelantarkan. Begitupun apabila ia seorang wanita yang berkarier dan ia merupakan seorang nyonya rumah yang baik maka orangpun akan menyatakan keheranannya dan tidak menyangka bahwa ia dapat bertindak sebagai nyonya rumah yang baik. Jelaslah ada prasangka terhadap wanita yang berkarier bahwa ia seorang ibu dan seorang nyonya rumah yang kurang baik.

Maka di dalam konteks ini timbul pertanyaan, bila saat yang terbaik bagi seorang ibu untuk bekerja atau kembali untuk bekerja? Bagi seorang ibu yang memutuskan untuk kembali bekerja dan masih mempunyai anak yang belum masuk sekolah menghadapi paling sedikit dua masalah. Pertama, anak tersebut sudah terbiasa dengan kehadiran ibunya. Kedua, hubungan antara ibu dan anak sudah agak mendalam, si ibu sudah tahu betul dan mengenai semua kebiasaan dari anaknya maupun keinginan serta kebutuhan-kebutuhannya, ia mengenal cara anaknya makan, tidur, sedang sakit/tidak enak badan, kurang sehat, takut dan sebagainya. Intuisi seorang ibu memungkinkan baginya untuk mengenal anaknya yang baik. Agak sukar bagi seorang ibu untuk meninggalkan anaknya pergi kerja apalagi kalau anak tersebut sudah sangat terbiasa dengan kehadiran ibunya.

Pada umumnya umur satu sampai tiga tahun bahkan lebih, merupakan masa di mana anak-anak membutuhkan perhatian yang khusus dari ibunya. Jadi agak berat dan sukar bagi seorang ibu untuk meninggalkan anaknya pada umur-umur tersebut. Akan tetapi situasinya akan lebih memudahkan apabila seorang ibu meninggalkan anaknya untuk bekerja sejak permulaan ketika anaknya masih kecil karena sejak permulaan anak-anak tersebut sudah menerima kenyataan bahwa ibunya bekerja. Anak yang ibunya bekerja sejak permulaan sudah terbiasa dengan pergantian dari figur ibunya ke pengasuhnya dan kelompok bermainnya (play group), di samping itu anak tersebut akan mengalami banyak waktu yang independen. Anak-anak itu mudah bergaul dengan guru-guru atau orang-orang lain di sekolahnya atau kelompok bermainnya (play group). Apabila mereka membutuhkan sesuatu, mereka dapat mengutarakannya. Mereka juga mudah bergaul dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu anak-anak yang ibunya bekerja pada umumnya sering dikatakan menjadi lebih cepat dewasa dalam arti lebih dapat berdiri sendiri.

Seorang ibu yang mau berhenti bekerja untuk sementara waktu karena alasan-alasan tertentu dan berniat untuk bekerja kembali pada suatu saat, tekadnya harus bulat dan mengadakan persiapan untuk kembali bekerja. Kalau tidak demikian maka ini tidak akan sampai terrealisir. Oleh karena itu situasinya akan lebih sukar untuk kembali bekerja. Akan lebih mudah bagi ibu-ibu untuk kembali bekerja apabila menunggu sampai anaknya yang terkecil masuk sekolah. Kembali untuk bekerja apabila anak-anaknya berumur antara 6 — 11 tahun secara relatif merupakan masa yang termudah, oleh karena jam sekolahnya sudah lebih lama. Pada umumnya anak-anak antara umur-umur tersebut lebih sibuk dengan kesibukannya sendiri dari pada ia mau campur dengan orang tuanya. Mereka lebih senang main dengan teman-teman sebayanya atau melakukan aktivitas lainnya. Biasanya setelah mereka pulang sekolah mereka pergi lagi mencari teman untuk main atau bermain-main dengan kakak atau adiknya. Mereka bermain bola, naik sepeda, main di rumah temannya atau aktivitas apa saja yang tidak membutuhkan perhatian

terus dari seorang ibu. Pada umumnya anak-anak yang sudah sekolah dapat diajak bicara, mengetahui dan dapat mengerti mengapa ibunya pergi. Malahan kadang-kadang mereka merasa bangga atas pekerjaan ibunya. Mereka tidak merasa takut untuk ditinggalkan sendiri selama sejam dua jam, terutama anak yang sudah berumur 8 tahun atau lebih. Di dalam kenyataannya mereka sebenarnya menyenangkan kebebasannya. Pada usia ini mereka juga sudah merasa dirinya lebih aman (secure) dan karena itu lebih mudah dapat menyesuaikan diri dengan situasi lingkungannya.

Menurut *Gesell*, pada umur 5 tahun anak-anak lebih dapat diandalkan lebih stabil dan lebih mudah dapat menyesuaikan diri. Mereka merasa aman di dalam dirinya, tenang, ramah dan tidak terlalu banyak menuntut dari hubungannya dengan orang lain. Jadi apabila anak sudah berumur 5 tahun, merupakan masa yang tepat bagi ibu-ibu untuk kembali bekerja atau pada waktu anaknya memasuki sekolah kelas satu.

Akan tetapi apabila mereka mulai menginjak masa remajanya, mereka membutuhkan orang dengan siapa mereka bisa ajak bicara atau bertukar pikiran. Oleh karena pada masa ini akan lebih sukar bagi mereka untuk dapat mengutarakan dan mengeluarkan segala isi hati, emosi, pikiran maupun pendapat mereka. Apa yang terkandung di dalam diri mereka tidak dapat dikeluarkan begitu saja di meja makan waktu berkumpul. Maka didalam hal ini orang tuanya harus membuat dan menyediakan waktu di mana si anak dapat merasa bebas untuk berbicara dengan mereka.

Banyak orang serta teori yang menghubungkan kenakalan remaja dengan ibu-ibu yang bekerja. Oleh karena berdasarkan penelitian banyak di antara remaja-remaja yang nakal, ibunya mempunyai pekerjaan di luar rumahnya. Akan tetapi mereka mengabaikan bahwa remaja yang nakal juga terdapat di kalangan keluarga di mana ibunya tidak bekerja. Jadi faktor ibu yang bekerja dapat merupakan salah satu sebab keadaan kenakalan remaja akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai faktor sebab penentu yang mutlak.

Jadi masalah utama yang dihadapi oleh orang tua yang bekerja adalah mengenai anak. Masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu yang bekerja berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu yang sepanjang hari berada di rumah. Ibu-ibu yang bekerja di satu pihak ingin sukses di dalam kariernya akan tetapi di lain pihak iapun ingin sukses sebagai seorang ibu. Akan tetapi kedua-duanya tidak dapat dilakukannya sekaligus secara efektif. Seorang ibu yang bekerja seolah-olah berada di antara dua pilihan yang berat baginya, pertama keluarganya dan kedua, pekerjaannya atau kariernya.

Yang sebaiknya dapat dilakukan apabila kedua orang tuanya bekerja adalah apabila salah satu pihak terlambat pulang ke rumah maka pihak yang satu berusaha untuk dapat pulang ke rumah lebih dahulu, sehingga anak-anak tidak ditinggalkan terlalu lama sendiri di rumah terutama apabila mempunyai anak yang masih kecil.

MASALAH DI DALAM DIRINYA

Ibu-ibu yang bekerja pada umumnya terlalu banyak bekerja dan letih sekali oleh karena di samping pekerjaan dan tugasnya di luar rumah, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Begitu ia pulang ke rumah dari pekerjaannya ia sudah dihadapi oleh tugas yang lain lagi di rumahnya. Bagi ibu-ibu yang bekerja kadang-kadang sangat menginginkan waktu istirahat di mana ia dapat duduk dengan tenang sambil membaca atau relaks. Lain halnya dengan para suami, pada umumnya mereka tidak mempunyai keinginan seperti ini. Mereka lebih cenderung pada keinginan untuk mendapatkan lebih banyak uang, mempunyai lebih banyak waktu untuk kesenangan atau hobby mereka, main golf, kesempatan untuk bergajian dengan sekeluarga atau isterinya. Lain halnya dengan ibu-ibu, mereka ingin sendirian pada waktu-waktu tertentu.

Anak lebih mempunyai arti di dalam kehidupan seorang ibu dan karena ikatan dan hubungan inilah seringkali merupakan penghambat di dalam karier seorang ibu. Ikatan ini begitu intim,

seorang ibu tahu betul akan keinginan anaknya walaupun anaknya belum dapat berbicara, ia dapat mendengar anaknya menangis walaupun ia sedang tidur dengan nyenyaknya.

Oleh karena itu seorang ibu seringkali mengalami suatu konflik di dalam dirinya, ia merasa dibutuhkan di rumah oleh anaknya di samping itu ia juga sukar melepaskan tanggung jawabnya di tempat pekerjaannya. Perasaan bersalah (*maternal guilt*) pada seorang ibu tentu dapat mempengaruhi pekerjaannya dan begitupun sebaliknya. Apabila ia berangkat ke tempat pekerjaannya dan meninggalkan anaknya di rumah timbul suatu perasaan bersalah, seolah-olah ia telah mengabaikan dan melalaikan anaknya dan perasaan bersalah (*maternal guilt*) ini tentu akan dibawa ke tempat pekerjaannya, yang tentunya akan memberi efek terhadap pekerjaannya sehingga ia sukar dapat mengkonsentrasikan dirinya terhadap pekerjaannya. Apalagi kalau anaknya sedang sakit di rumah. Akan tetapi begitupun sebaliknya apabila ia tetap berada bersama anaknya di rumah maka sukar baginya untuk melepaskan tanggung jawab pekerjaannya. Perasaan bersalah (*maternal guilt*) ini kadang-kadang dapat sedemikian mendalam sehingga merupakan suatu tekanan psikologis bagi seorang ibu dan antara lain dapat mengakibatkan seorang ibu selalu berada di dalam keragu-raguan.

Kampanye susu ibu, bahwa susu ibu adalah yang terbaik memang tak dapat diingkari. Akan tetapi seorang ibu yang harus kembali untuk bekerja tak dapat menutupi diri dari kenyataan yang harus ia hadapi, di mana keadaannya tidak memungkinkan baginya untuk menyusui anaknya terus. Susu ibu terpaksa digantikan oleh susu buatan. Isyu-isyu yang dilontarkan dapat menimbulkan suatu "maternal guilt" pada seorang ibu.

Banyak di antara ibu-ibu berprasangka apabila mereka pergi bekerja dan meninggalkan anaknya pada seorang pembantu atau keluarga, apakah anak ini bisa menjadi lebih dekat dengan mereka dari pada ke orang tuanya. Perasaan akan ketakutan ini selalu diliputi oleh seorang ibu yang anaknya dirawat oleh orang lain. Sebenarnya ketakutan atau prasangka

ini tidak perlu diada-adakan. Anak itu tetap akan mengenal siapa ibu dan bapaknya, siapa yang menyayangi dan memperhatikannya setiap waktu, nalurinya yang akan mengatakan ini semuanya. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Apa bedanya hanya beberapa jam sehari tidak berada bersamanya dibandingkan dengan bertahun-tahun dan bermalam-malam dan hari-hari maupun saat-saat lainnya yang akan dihabiskan bersama. Ibu-ibu yang bekerja ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya pada waktu ia senggang dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak bekerja. Hal ini mungkin disebabkan karena waktu bertemu dengan anak-anaknya adalah terbatas, maka waktu yang berharga ini dipergunakannya sebaik dan se-efisien mungkin bersama anak-anaknya. Pada umumnya anak-anak yang ibunya bekerja, pergi masuk tidur lebih malam, oleh karena orang tuanya ingin lebih lama bersama anaknya sedangkan ibu-ibu yang tidak bekerja ingin cepat-cepat menidurkan anaknya. Seorang ibu yang bekerja tidak berarti bahwa kontak dengan anaknya makin renggang, malahan sebaliknya. Waktu yang begitu sedikit akan dipergunakannya sebaik mungkin bersama anaknya dan hubungan dengan anaknya dapat lebih intim dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak bekerja.

Seorang ibu pada umumnya memegang peranan yang lebih besar di dalam pendidikan anak-anaknya walaupun kedua orang tua merupakan pendidik utama. Anak-anak belajar banyak dari ibunya terutama mengenai pandangan hidup (way of life) yang akan membentuk persepsi mereka terhadap berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, kekeluargaan dll. Pada umumnya ibu-ibu yang bekerja dengan motivasi ambisi yang besar mempunyai anak perempuan dengan motivasi untuk berkarier. Akan tetapi ada pula ibu-ibu yang walaupun tidak bekerja mempunyai anak-anak yang berambisi oleh karena mereka tidak mau anaknya akan menjadi sama seperti mereka. Anak perempuan yang ibunya bekerja selama masa kanak-kanaknya relatif kurang mendapatkan kesukaran di dalam menemukan identitas mereka baik sebelum atau sesudah perkawinan mereka.

PENUTUP

Dengan timbulnya berbagai gagasan mengenai perbaikan kedudukan serta hak wanita telah mengubah persepsi wanita mengenai dunia maupun dirinya. Perubahan ini juga didukung oleh apa yang dibacanya serta juga oleh sikap-sikap yang dihadapinya. Gagasan-gagasan itu pada umumnya bermaksud untuk menaikkan derajat kaum wanita, memupuk harga diri dan kemampuan sendiri. Perubahan yang terjadi merupakan dinamika dari sejarah dan masyarakat.

Tujuan untuk bekerja bagi seorang ibu bukan saja untuk menjamin suatu kehidupan keluarga yang bahagia, karier yang baik, suami yang baik atau keuangan yang cukup untuk dapat bersenang-senang, akan tetapi dengan bakat, kemampuan serta pengetahuan yang dimilikinya ia ingin dapat melakukan lebih banyak lagi. Ia ingin dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Kebebasan dan ambisi itu selalu harus ada pada seorang wanita supaya ia dapat menjadi lebih kreatif dan maju lagi.

Di dalam hal di mana kedua orang tuanya bekerja, tentu mesti ada hal-hal ataupun aktivitas yang dikorbankan sebagai akibat dari waktu yang menjadi langka. Menghadiri pesta, pertemuan, kunjungan keluarga atau kerabat, rekreasi terpaksa harus dibatasi atau dikurangi karena langkanya waktu. Biasanya hal ini dibicarakan antar suami-isteri apa yang harus dikurangi dan dikorbankan. Di samping itu kedua suami-isteri juga membutuhkan waktu bagi mereka sendiri (*moments of privacy*) yang merupakan kesempatan yang baik untuk menjamin hubungan suami-isteri.

Di antara ibu-ibu yang bekerja banyak yang tahu apa yang mereka merasa kehilangan dan mereka seringkali menginginkan untuk mendapatkannya, yaitu waktu luang bagi mereka sendiri (*private leisure time*).

Pulang secepatnya dari tempat pekerjaan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh kedua orang tua yang

bekerja tanpa memikirkan apakah sudah ada bantuan di rumah atau melihat kepada umur anak-anaknya. Jangan sampai seorang anak merasa tidak diperhatikan, diabaikan dan dilalaikan; ia dapat merasa dirinya tidak aman dan akan mencoba mengkompensir "kekurangan perhatian dan cinta kasih" dengan makanan serta akan menarik perhatian dari orang lain. Nafsu makannya berkurang atau hilang, yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangannya.

Seorang ibu yang bekerja seringkali menghadapi kebimbangan apabila mengingat anak-anaknya. Apakah tidak sebaiknya apabila ia berhenti kerja saja. Yang pertama-tama harus dilakukan di dalam hal ini adalah menghilangkan atau merepres pemikiran untuk berhenti bekerja. Apabila pikiran ini tidak dihilangkan cepat-cepat maka akan lebih mempersulit keadaannya, ia akan berada di dalam ketidakpastian, kebimbangan serta keraguan yang hanya akan menambah perasaan bersalahnya (maternal guilt). Kedua, apapun yang menjadi masalahnya, hendaknya sejak permulaan itu dilihat atau diterima sebagai bersifat sementara saja dan segera dapat teratasi dalam waktu singkat. Di dalam menghadapi suatu masalah, support yang terbesar dapat diperolehnya dari ibu-ibu lain yang juga bekerja. Dari mereka ia dapat memperoleh dorongan, semangat, simpati serta nasehat dari pengalaman mereka sendiri.

Setiap ibu yang bekerja mempunyai tehnik tersendiri di dalam mengatasi kesulitannya masing-masing. Tenaga dari seorang pembantu rumah tangga serta pembantu yang dapat mengurus anak-anak dengan baik dan yang dapat dipercaya, merupakan solusi di dalam hal ini. Di samping itu kelompok bermain (play group) juga merupakan solusi yang lain. Akan tetapi tidak mudah untuk mendapatkan seorang pembantu atau baby sitter yang qualified, di samping itu berarti juga pengeluaran finansial yang lumayan. Sedangkan untuk mendapatkan kelompok bermain (play group) juga sukar, apakah di dekat sekitar daerah tempat tinggalnya ada kelompok bermain dan apakah daya penampungannya masih memungkinkan untuk menerima anak tersebut.

Daerah tempat tinggal merupakan faktor yang penting di dalam kaitannya dengan pekerjaan suami, pekerjaan isteri, sekolah, tempat perbelanjaan (toko dan pasar), fasilitas sosial, praktek dokter, bank, tempat ibadah, fasilitas ataupun lembaga yang penting di dalam kehidupan keluarga tersebut. Rumah yang terletak dekat sekolah serta fasilitas sosial lainnya pada umumnya lebih mudah dapat dicari dari pada rumah yang terletak berdekatan dengan pekerjaan suami maupun isteri. Daerah tempat tinggalnya juga mempengaruhi si anak, yaitu teman-teman bermainnya serta fasilitas rekreasi yang tersedia di daerah tersebut.

Seorang ibu hendaknya selalu berterus terang kepada anaknya. Apabila ia mau meninggalkan anaknya di rumah hendaknya dikatakan kepada anaknya ke mana ia pergi. Kalau ibunya bekerja, hendaknya dijelaskan kepada anaknya bahwa ia bekerja dan akan pulang secepatnya, tetapi inipun juga harus ditepati. Seorang anak seringkali tidak mengizinkan ibunya untuk meninggalkannya di rumah atau di sekolah/kelompok bermain. Rasa ketakutan untuk ditinggalkan harus dihilangkan terlebih dulu. Banyak ibu-ibu berpendapat bahwa dengan membawa anaknya sekali-kali ke tempat pekerjaannya dapat mengatasi hal ini. Atau dengan sekali-sekali tilpon ke rumah atau ke tempat pekerjaan ibunya, seolah-olah memberi kesan bahwa ibunya tidak terlalu jauh dari anaknya. Mengantarkan anaknya ke sekolah atau kelompok bermain dengan menunggu anaknya sebentar dan membantu anaknya supaya duduk dalam kelas, ia dapat merasakan support dari ibunya. Apabila hal ini tidak berhasil, hendaknya dicoba kembali.

Akan tetapi apabila anak tersebut tidak mau melepaskan diri dari ibunya di sekolah maka sebaiknya apabila bapaknya yang mengantarkan anak tersebut ke sekolah. Ibu berpamitan dengan anaknya di rumah, jadi bukan di sekolah apabila ternyata anak tersebut sukar melepaskan diri dari ibunya. Kemungkinan berpamitan dengan ibunya di rumah akan lebih memudahkan bagi anak tersebut. Sedangkan untuk berpamitan dengan bapaknya akan lebih memudahkan bagi anak tersebut dibandingkan dengan ibunya.

Apabila mau meninggalkan anak untuk berangkat ke tempat pekerjaan, hendaknya berangkat dengan penuh keyakinan. Janganlah berangkat ke tempat pekerjaan dalam kebimbangan serta keraguan. Janganlah pula memperlihatkan kepada anak bahwa terasa berat untuk meninggalkannya dan begitupun sebaliknya. Anak harus diyakinkan bahwa ibunya akan pulang ke rumah pada jam seperti biasanya, tetapi inipun harus ditepati pula. Apabila hubungan anak tersebut lebih dekat dengan ibunya maka sebaiknya apabila ibunya berangkat ke tempat pekerjaannya lebih dulu dari pada bapaknya. Di samping itu pembantu yang mengurus anak-anak harus diyakinkan bahwa ibunya yakin berbuat yang benar. Konflik yang ada pada diri anak tersebut akan hilang apabila ia merasa tidak ada yang perlu ia khawatirkan dan tidak ada yang merasa khawatir.

Ibu-ibu yang bekerja sebagai part-timer, adalah mereka yang memiliki yang terbaik dari kedua dunia ini. Akan tetapi bagi kebanyakan orang pekerjaan yang part-time tidak merupakan jawaban untuk mengimbangi kehidupan anak, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaannya.

Pada umumnya ibu-ibu yang bekerja lebih menarik di dalam penampilannya oleh karena harus keluar rumah maka kelihatannya selalu menarik, berbeda dengan ibu-ibu yang tinggal di rumah saja. Dan karena pekerjaannya, ia selalu berhubungan dengan orang-orang lain, baik itu orang-orang lingkungan pekerjaannya maupun orang luar, maka cara berpikirnya tidak terlalu sempit. Ia dapat bertukar pikiran dengan teman-teman seprofesinya ataupun orang-orang lain. Ibu-ibu yang bekerja bebas untuk merasa kesenangan, lebih relaks, lebih produktif di dalam pekerjaannya dan lebih bahagia dengan peranannya sebagai ibu dan isteri, di samping itu secara finansial merasa lebih aman serta mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemampuannya. Hubungannya juga lebih intim dengan anaknya karena waktu yang begitu langka akan dipergunakan bersama anaknya.

Di dalam kaitannya ibu-ibu yang bekerja maka dapatlah dianalisa bahwa saat yang tepat atau yang paling mudah bagi

seorang ibu untuk kembali bekerja adalah sebagai berikut :

1. Apabila anaknya masih bayi, sehingga dengan mudah dapat menyesuaikan dirinya kepada jadwal/schedule dari kedua orang tuanya yang bekerja dengan mudah dan cepat, tanpa mengalami gangguan atau tekanan emosi.
2. Apabila anaknya sudah masuk sekolah dan tidak membutuhkan perlakuan yang intensif lagi.

Sedangkan saat yang paling sukar untuk kembali bekerja bagi seorang ibu adalah:

1. Apabila anaknya berada pada masa pra-sekolah, sebelum usia 5 tahun, dan mudah terganggu oleh perubahan yang mendadak dalam kegiatan ibunya.
2. Apabila anak-anak memasuki masa remajanya, di mana pada dirinya terdapat pertentangan atau ambivalensi mengenai kekuasaan orang tua dan dorongan yang ada pada dirinya untuk bebas, di samping itu juga ada kebutuhan akan rasa keterlindungan dari orang tua.

Seorang ibu yang mau bekerja kembali setelah melahirkan, harus disupport di dalam keputusannya ini, yaitu oleh suaminya, kerabatnya, lingkungannya, teman-temannya serta para dokter.

Apabila kedua orang tuanya bekerja maka berdua pulalah yang harus mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap anak-anak. Di sinilah dibutuhkan suatu perubahan sikap serta pengertian dari para suami sebagai akibat dari perubahan sosial di mana ibu-ibu bekerja.

DAFTAR PUBLIKASI — CSIS

MASIH TERSEDIA

SERI BUKU DAN ANALISA

Ali MOERTOPO, STRATEGI KEBUDAYAAN Rp. 750,— *Ali MOERTOPO*, STRATEGI POLITIK NASIONAL Rp. 1.000,— *Ali MOERTOPO*, SOME BASIC THOUGHTS ON THE ACCELERATION AND MODERNIZATION OF 25 YEARS DEVELOPMENT Rp. 1.250,— *Ali MOERTOPO*, BURUH DAN TANI DALAM PEMBANGUNAN Rp. 400,— INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL 1977 Rp. 5.000,— INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL 1976 Rp. 5.000,— INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL 1975 Rp. 4.000,— INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL 1974 Rp. 1.750,— PERSPEKTIF 1978 Rp. 700,— BEBERAPA ULASAN TAHUN 1977 Rp. 700,— BEBERAPA PROSPEK PERKEMBANGAN TAHUN 1977 Rp. 700,— BEBERAPA TINJAUAN TAHUN 1976 Rp. 700,— *Daed JOESOE*, DUA PEMIKIRAN TENTANG PERTAHANAN, KEAMANAN DAN STRATEGI NASIONAL Rp. 1.000,— PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA Rp. 1.200,— (edisi luks) Rp. 300,— (edisi biasa) PANCASILA — ARTI DAN PENERAPANNYA Rp. 700,— P-4 dan GBHN (bahasa Inggris) Rp. 600,— KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN Rp. 700,— KEBUDAYAAN REMAJA, KEBUDAYAAN DELINKWEN DAN SITUASI KRIMINALITAS Rp. 350,— BUDAYA DAN PENDIDIKAN Rp. 700,— BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN Rp. 700,— GENERASI MUDA Rp. 700,— BEBERAPA MASALAH DALAM NEGERI Rp. 700,— *A.M. W. PRANARKA*, SITUASI KULTURIL DUNIA DEWASA INI Rp. 700,— *Kirdi DIPOYUDO*, TIMUR TENGAH DALAM PERGOLAKAN Rp. 1.500,— *Kirdi DIPOYUDO*, AFRIKA DALAM PERGOLAKAN Rp. 1.500,— SOUTHEAST ASIA AND THE WORLD OF TOMORROW Rp. 3.000,— ASEAN: PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (I) dan (II) a Rp. 700,— ASIA TENGGARA: PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA Rp. 700,— PERKEMBANGAN ASEAN Rp. 700,— BEBERAPA PERKEMBANGAN INTERNASIONAL Rp. 700,— JEPANG DAN POLITIK EKONOMI LUAR NEGERINYA Rp. 700,— *Jusuf WANANDI*, KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRESIDEN CARTER DAN PERANAN KONGRES AS Rp. 700,— KEPINCANGAN HUBUNGAN UTARA-SELATAN Rp. 700,— UTARA — SELATAN & TIMUR — BARAT Rp. 700,— NON-ALIGNMENT Rp. 700,— NEGARA NON BLOK DAN MASALAH HABITAT Rp. 700,— SURIAH DI LIBANON DAN PENYELESAIAN RASIAL Rp. 700,— REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA Rp. 1.250,— STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA Rp. 700,— DETENTE Rp. 350,— PERKEMBANGAN POLITIK KOLONI-KOLONI PORTUGIS Rp. 350,— UNI SOVIET Rp. 350,— AFRIKA SELATAN SAHARA Rp. 350,— KAWASAN TIMUR TENGAH Rp. 350,— TERUSAN SUEZ DAN BANGSA PALESTINA Rp. 350,— JAPAN-INDONESIA RELATIONS IN THE CONTEXT OF REGIONALISM IN ASIA Rp. 1.500,— SELF RELIANCE AND NATIONAL RESILIENCE Rp. 1.250,— SECOND INDONESIAN-JAPANESE CONFERENCE Rp. 1.500,— VIETNAM-KAMBOJA, SELAT MALAKA DAN MASALAH RASIAL Rp. 700,— DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL Rp. 700,— *J. PANGLAYKIM*, POTENSI PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN Rp. 350,— MASALAH ENERGI DUNIA Rp. 350,— MODAL SEBAGAI FAKTOR KEKUATAN Rp. 350,— ASPEK STRATEGIS DAN INTERNASIONAL DARI PERSOALAN ENERGI Rp. 350,— HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM DUNIA YANG BERUBAH Rp. 350,— TINJAUAN EKONOMI TAHUN 1974 Rp. 350,—

KEMUNGKINAN KENAIKAN HARGA MINYAK BUMI Rp. 350,— BERAS DAN KOPRA Rp. 350,— MASALAH KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Rp. 350,— EKONOMI DUNIA DAN SISTEM KINGSTON Rp. 700,— EKONOMI DAN MASYARAKAT MANUSIAWI Rp. 700,— J. PANGLAYKIM, PERSOALAN MASA KINI: PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINASIONAL Rp. 1.500,— J. PANGLAYKIM, INDONESIA'S ECONOMIC AND BUSINESS RELATIONS WITH ASEAN AND JAPAN Rp. 3.000,— J. PANGLAYKIM, BUSINESS RELATIONS BETWEEN INDONESIA AND JAPAN Rp. 500,— R.B. SOEHARTONO, ECONOMIC DEVELOPMENT AND NATIONAL RESILIENCE Rp. 500,— J. PANGLAYKIM, TRENDS IN MARKETING Rp. 1.000,— STRATEGI PEMBINAAN PENGUSAHA SWASTA NASIONAL Rp. 2.000,— SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRASWASTAAN DI INDONESIA Rp. 2.000,— PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA Rp. 700,— MASALAH DANA INTERNASIONAL DAN NASIONAL Rp. 700,— J. PANGLAYKIM, BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG MEMPERTINGGI KAPABILITAS DAN KAPASITAS BANK-BANK SWASTA NASIONAL Rp. 700,— KWIK Kian Gie, KREDIT MACET, DILEMMA MASA KINI Rp. 700,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Vol. I No. 1, OCTOBER 1972, Rp. 500,—:

- Ali MOERTOPO, *Some Basic Considerations in 25-Years Development*
- Adam MALIK, *Indonesia's Foreign Policy*
- SOEDIJANA, *People's Consultative Assembly*
- Barlianta HARAHAHAP, *Changes in the State Budget and Its Relationship to the Development Process in Indonesia*
- Gunawan MUHAMMAD, *In Search of a New Ethos*
- Chronicles

Vol. I No. 2, JANUARY 1973, Rp. 500,— :

- Juwono SUDARSONO, *ASEAN : The Uncertain Commitment*
- LIE Tek Tjeng, *ASEAN and East Asia in the Seventies: Some Remarks*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Foreign Economic Relations — Some Trade Aspects*
- J. PANGLAYKIM (PANGESTU), *Domestication of Multinational Corporations and Southeast Asia*
- Sayidiman SURYOHADIPROJO, *The Future of Southeast Asia*
- Soerjono SOEKANTO, *Elites in Three Southeast Asia Countries*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *Neutralization: A New Hope of Southeast Asia*
- Documents : *The ASEAN Declaration; Organizational Chart of ASEAN; The Kuala Lumpur Declaration*
- Chronicles

Vol. I No. 3, APRIL 1973, Rp. 500,— :

- Rosihan ANWAR, *Socio-Political Aspects of the MPR*
- Rufinus LAHUR, *The Broad Lines of the State Policy*
- SUKIJAT, *General Government and Regional Autonomy*
- Soeleiman SOEMARDI, *Pattern of Social Development According to the Broad Lines of the State Policy*

- A. HAFID, *Population Policy and Social-Economic Development in the Broad Lines of the State Policy*
- MASHURI, *Problems Underlying Educational Reform*
- Jakob UTOMO, *The Indonesian Press and Development*
- Barlianta HARAHA, *Election of the President and Vice-President: Office, Responsibility and Power*
- Documents: The Broad Lines of the State Policy; Bio-Sketch of President Soeharto; Bio-Sketch of Vice-President Sri Sultan Hamengku Buwono IX
- Chronicles

Vol. I No. 4, JULY 1973, Rp. 500,—:

- SOEDJATMOKO, *Reflections on Non-Alignment in the 1970's*
- O. Sutomo ROESNADI, *ASEAN and the Great Powers*
- M. Hadi SOESASTRO, *Japan and Southeast Asia : A Regional or a Global Question ?*
- J. PANGLAYKIM, *Some Notes on Japan — Indonesia Business Relations : An Indonesian View*
- Sri-Edi SWASONO, *Some Notes on the Nurturing of the Indonesian Entrepreneur*
- Sayidiman SURYOHADIPROJO, *The Territorial Defense Concept*
- Ali MOERTOPO, *The Security Aspect of Energy Resources*
- Tb. Bachtiar RIFAI, *Education and the Development of the Younger Generation*
- Documents : Mineral Resources Development in Indonesia; Japanese Investment in Indonesia
- Chronicles

Vol. II No. 1, OCTOBER 1973, Rp. 500,— :

- BOECHARI, *Some Aspects of Traditional Society*
- Moh. Said REKSOHADIPROJO, *The Inner Life of the Javanese*
- T.O. IHROMI, *The Relevance of Studying Ethnic Groupings in Indonesia*
- Bonokamsi DWIPOJONO, *Kebatinan and Kebatinan Movements for the Javanese*
- Soerjono SOEKANTO, *Elites in Adat Villages of Lampung and Minangkabau*
- Ajip ROSIDI, *Experiences in Recording Pantun Sunda*
- Pandam GURITNO, *Wayang Purwa*
- Anton M. MOELIONO, *Terms and Terminological Language*
- Chronicles

Vol. II No. 2, JANUARY 1974, Rp. 500,— :

- Soedjono HOEMARDANI, *Indonesia — Japan Relations in the Future — A Strategic Review*
- Moh. SADLI, *Impressions on the First Japanese-Indonesian Conference*
- Soemitro DJOJHADIKUSUMO, *The Economic Future of the Pacific Basin*
- Daoed JOESOEF, *Knowledge Economy and World Economy*
- THEE Kian-wie, *Foreign Investment and Labour-Intensive Industries*
- M. Hadi SOESASTRO, *A Well-Balanced Growth Coupled with Justice : An Economic or a Political Issue ?*
- NUGROHO, *Data Flow and Statistical Organization in Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Business Administration : Curricular Implications*
- A.M.W. PRANARKA, *Critical Analysis of the Process of Educational Reform in Indonesia*

- Paramita R. ABDURACHMAN, *In Search of Spices: Portuguese Settlements on Indonesia Shores*
- Chronicles

Vol. II No. 3, APRIL 1974, Rp. 500,— :

- Juwono SUDARSONO, *International Studies in Indonesia: Problems in Training and Research*
- Harsja W. BACHTIAR, *The Social Sciences in Indonesia*
- Iskandar ALISJAHBANA, *Technology and Development*
- Selo SOEMARDJAN, *Tourism Site Development Planning Problems and Possibilities*
- Wiratmo SUKITO, *National Resilience and the Role of Culture*
- Dilip CHANDRA, *Indo-Indonesian Relations: An Indian Viewpoint*
- Chronicles

Vol. II No. 4, JULY 1974, Rp. 500,—

- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Energy and Raw Materials Present and Future*
- Ali MOERTOPO, *Politics and Raw Materials: Challenges of the World Today and the Consequences for Domestic Policies*
- Mohammad SADLI, *Oil and Development*
- H.S. KARTADJOEMENA, *Independence and International Realities: Indonesia as Natural Resource Producer and an Intermediate Power*
- St. Munadjat DANUSAPUTRO, *Wawasan Nusantara and the International Sea System*
- Documents: Address by the President of the Republic of Indonesia, H.E. General Soeharto; Opening Statement by the Leader of the Indonesian Delegation at the Seventh ASEAN Ministerial Meeting, Jakarta 7 May 1974; Joint Communique
- Chronicles

Vol. III No. 1, OCTOBER 1974, Rp. 500,— :

- Ali MOERTOPO, *The International and Strategic Aspects of the Energy Problem*
- Donald G. McCLOUD, *Quantitative Analysis in Indonesian Foreign Policy*
- Soedjana SAPIIE, *Transfer of Technology A Proposed Solution for Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Financial Institutions in Indonesia: Some Notes*
- Anwar NASUTION, *Macro-Economic Development 1966-1973*
- Harimurti KRIDALAKSANA, *The Function of a Standard Dictionary in the Development of Indonesian*
- Chronicles

Vol. III No. 2, JANUARY 1975, Rp. 500,— :

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *A Look at the Economy in 1974*
- Daoed JOESOEFE, *International Economy Including Problem of Natural Resources*
- Mochtar KUSUMAATMADJA, *Indonesia and the Law of the Sea Issue*
- Nugroho NOTOSUSANTO, *The Historical Development of the Dual Function of the Indonesian Armed Forces*
- Mastini HARDJO—PRAKOSO, *The Development of Libraries in Indonesia*
- Chronicles

Vol. III No. 3, APRIL 1975, Rp. 500,— :

- N. ISKANDAR, *When Z.P.G. in Indonesia ?*
- S.B. JOEDONO, *Japanese-Indonesian Relations: Present Problems and Future Possibilities*
- KWIK Kian Gie, *Foreign Capital and Economic Domination*
- Z. SALIM, *The Case for Industrially-Based Transmigration : Some Suggestions*
- Haryati SOEBADIO, *The Documentary Study of Traditional Balinese Architecture Some Preliminary Notes*
- Chronicles

Vol. III No. 4, JULY 1975, Rp. 500,— :

- St. Munadjat DANUSAPUTRO, *The International Sea System in Perspective*
- J. PANGLAYKIM, *Financial Markets and Their Contribution to the Development of ASEAN : An Assessment*
- Bing P. LUKMAN, *After the War : Indochina and the Politics of Southeast Asia*
- J. Stephen HOADLEY, *New Zealand and Indonesia : The Evolving Relationship in Regional Perspective.*
- Hermien Hadiati KOESWADJI, *The Historical Development of Villages on the Island of Lombok*
- Chronicles

Vol. IV No. 1 OCTOBER 1975, Rp. 500,— :

- H. Roeslan ABDULGANI, *The Origins of the Concept "Free and Active" in Indonesian Foreign Policy*
- Taufik ABDULLAH, *National Integration and Social Science in Indonesia*
- LIE Tek Tjeng, *The Asahan Project and the Future of Indonesian-Japanese Relations : Some Remarks*
- H. SIREGAR, *Prognostications for Indonesian Selfsufficiency in Rice*
- Wiratmo SUKITO, *The Inviolability of Cultural Frontiers*
- Chronicles

Vol. IV. No. 2, 3, 4 SPECIAL ISSUE 1976, Rp. 500,—:

- J. Soedjati DJIWANDONO, *The ASEAN after the Bali Summit*
- Ali MOERTOPO, *Political, Economic and Strategic Development of Southeast Asia with Particular Emphasis on the Future of ASEAN*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *A Note on ASEAN : Present and Future*
- J. PANGLAYKIM, *Indonesia's Economic and Business Relation with other ASEAN Countries*
- Daed JOESOEUF, *Some Thoughts on Free Trade*
- Michael LEIFER, *Problems and Prospects of Regional Cooperation in Asia : The Political Dimension*
- Documents : THE ASEAN Declaration : The Kuala Lumpur Declaration; Declaration of ASEAN Concord; Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia; Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat; Joint Press Communique of the Meeting of the ASEAN Heads of Government, Bali, 23-24 February 1976
- Chronicles

Vol. V Nol. 1, JANUARY 1977, Rp. 700,— :

- Daoud JOESOEFF, *The New International Economic Order*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Technology, Economic Growth and Environment*
- J. PANGLAYKIM, *Commodity Price Stability*
- A.R. SOEHOED, *Commodities and Viable Economic Sectors A Possible Basis for Development Planning*
- O. Abdul RACHMAN, *Minerals, Food and Shipping : Factors in Strategic Considerations*
- Soedjono HOEMARDANI, *Supervision of Development*
- *Chronicles*

Vol. V No. 2, APRIL 1977, Rp. 700,— :

- J. Stephen HOADLEY, *New Zealand and ASEAN*
- Ali MOERTOPO, *The Indian Ocean: Strategic and Security Problems*
- J. PANGLAYKIM, *North-South Production Trade Patterns*
- W. Donald McTAGGART, *Aspects of the Tourist Industry in Indonesia*
- Ziad SALIM, *The Growth of the Indonesian Language: The Trend towards Indo-Saxonization*
- Sartono KARTODIRDJO, *Peasant Mobilization and Political Development in Indonesia*
- *Chronicles*

Vol. V No. 3, JULY 1977, Rp. 700,— :

- Harry TJAN SILALAH, *The 1977 General Elections : The Results and the Role of Traditional Authority Relations in Modern Indonesian Society*
- WIJARSO, *The Energy Game: An Indonesian Version*
- Ziad SALIM, *Overdevelopment as a Development Problem*
- Hermien Hadiati KOESWADJI, *Some Legal and Medical Problems in the Implementation of the National Family Planning Program in Indonesia*
- Peter and Sheryl SILZER, *Discourse Considerations in Bahasa Indonesia*
- *Chronicles*

Vol. V No. 4, OCTOBER 1977, Rp. 700,— :

- S. HARTO, *Private Universities in the System of Higher Education in Indonesia*
- M. Soenardi DJIWANDONO, *Introducing KKN : Indonesia's National Study Service Scheme*
- Mashuri, *Pancasila Democracy*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Energy Perspectives of the Third World*
- John M. MURPHY, *The International Dimensions and Domestic Consideration of Deep Seabed Mining.*
- Franklin B. WEINSTEIN, *The United States, Japan and Asian Security*
- *Chronicles*

Vol. VI No. 1, JANUARY 1978, Rp. 800,—

- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *What do the "Take-Off" Countries Expect from Industrial and Oil Producing Countries ?*
- J. PANGLAYKIM, *The Fukuda Doctrine : A Businessman's View*

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

- Ali Noor LUDDIN, *Investment Opportunities in Agro Industry in Indonesia*
- Sabana KARTASASMITA, *Aspects of Marketing and International Cooperation in Tin Commodities with Reference to Indonesia*
- A.S. NATABAYA, *The Archipelagic Principles and Indonesia's Interests*
- Aprilani SOEGIARTO, *The Development of Marine Science Capabilities in Indonesia*
- Book Review : Donald W. Fryer & James C. Jackson, *Indonesia*
- Chronicles

Vol. VI No. 2, APRIL 1978, Rp. 800,— :

- Mari Elka PANGESTU, *The Unemployment Drama in the Less Developed Countries : Indonesia*
- Ali MOERTOPO, *Political and Economic Development in Indonesia in the Context of Regionalism in Southeast Asia*
- Jusuf WANANDI, *President Carter's Foreign Policy and the Role of the American Congress*
- Hendra ESMARA, *The Long-Range Economic Perspective of West Sumatra*
- Haryati SOEBADIO, Kartini, *A Modern Woman, and Yet a Child of Her Time*
- Book Review : Douglas Miles M.A. PhD., *Outlass & Crescent Moon, A Case of Social and Political Change in Outer Indonesia*
- Chronicles

JILIDAN :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| — RINGKASAN PERISTIWA Tahun 1977 | Rp. 11.000,— |
| — ANALISA TAHUN 1974, 1975 | Rp. 6.000,— |
| — ANALISA & MONOGRAF TAHUN 1976, 1977 | Rp. 12.000,— |
| — THE INDONESIAN QUARTERLY | |
| Vol. I, II, III, V | Rp. 4.000,— |
| Vol. IV | Rp. 2.500,— |

Pesanan dengan pembayaran di muka, untuk luar kota ditambah ongkos kirim \pm 15%

MAJALAH ANALISA, RINGKASAN PERISTIWA, THE INDONESIAN QUARTERLY dan BUKU-BUKU CSIS dengan mudah bisa Anda dapatkan di
 MEDAN: TB Deli; PEKANBARU: TB Penyalur Berita; PADANG: TB Pancaran Ilmu,
 TB Pustaka Anggrek; PALEMBANG: TB Sriwijaya; JAKARTA: TB Ichtiar, TB
 Gramedia, TB Tropen, TB Gunung Agung. TB BPK Gunung Mulia, TB Tamaddun, TB
 Tintamas; TB Djambatan; TB Kinta; TB Marco; TB Parchunna, Bursa Buku Fak.
 Ekonomi UI; TB Jayakarta, TB Pelita; BANDUNG: TB Sumur Bandung, TB Karya
 Nusantara, TB Djawa, TB Gramedia; SEMARANG: TB Merbabu, TB Surya, TB Gajah
 Mada; JOGYAKARTA: TB Hien Hoo Sing, TB Kedaulatan Rakyat, TB Pembangunan;
 MAGELANG: TB Kedaulatan Rakyat; SURAKARTA: TB Budhilaksana; MALANG:
 TB Atoom; SURABAYA: TB Sari Agung; UJUNG PANDANG: TB Bhakti Baru,
 Hasanuddin University Press; IRIAN JAYA: TB Gunung Agung; DENPASAR: TB
 Sumber Agung

PEMBERITAHUAN ALAMAT BARU _____

Mulai 1 Agustus 1978 harap semua pembelian/pemesanan buku-buku dan majalah-majalah terbitan CSIS dialamatkan ke Centre for Strategic and International Studies, up. Biro Publikasi, Jalan Kesehatan 3/13, telpon 349489

FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai Pelanggan Majalah ANALISA

Nama : _____

Alamat : _____

Universitas* : _____

Untuk langganan selama setahun (12 nomor) mulai nomor: _____

Bersama ini kami kirim uang langganan Rp. 8.000,-/Rp. 7.200,-
melalui pos wesel atau _____

Mengetahui**

Pelanggan,

* khusus untuk Mahasiswa

** cap dan tanda tangan pihak Fakultas



FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai Pelanggan Majalah RINGKASAN PERISTIWA

Nama : _____

Alamat : _____

Universitas* : _____

Untuk langganan selama setahun (24 nomor) mulai nomor : _____

Bersama ini kami kirim uang langganan Rp. 10.000,-/9.000,-
melalui pos wesel atau _____

Mengetahui**

Pelanggan,

* khusus untuk Mahasiswa

** cap dan tanda tangan pihak Fakultas





Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintahan dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku yang membahas masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, strategi, pemerintahan, ideologi dan hubungan internasional yang sangat luas.



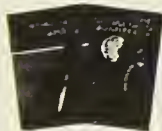
ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik idealogi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 700,—, langganan setahun (12 namar) Rp. 8.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 7.200,—



RINGKASAN PERISTIWA

majalah dwipekan, berisikan ringkasan peristiwa di dalam negeri [politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan hankam] dan dunia internasional yang kompleks sifatnya, bersumberkan dari surat kabar, buletin dan majalah dalam dan luar negeri. Majalah ini merupakan salah satu sumber penulisan buku 'Indonesia dan Dunia Internasional' yang diterbitkan setiap tahun oleh CSIS. Harga per eks Rp. 350,—, langganan setahun (24 namar) Rp. 10.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 9.000,—



THE INDONESIAN QUARTERLY

majalah triwulanan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 namar) Rp. 3.200,—. Jilidan Val. I, II, III, V @ Rp. 4.000,—, Val IV Rp. 3.000,—



BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, idealogi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain

CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analisis dan penelitian dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada :

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Biro Publikasi

Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat

Telpon : 349489